



RENCANA KERJA

PEMULIHAN EKONOMI
NASIONAL(PEN)



Pusat Diklat SDM Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2020

KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SDM
PUSAT DIKLAT SDM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
Jalan Mayjen Ishak Juarsa Gunung Batu Kotak Pos 141 – Bogor 16118
Telp : (0251) 8313622 Fax. (0251) 83235655, 8312841
e-mail : pusdiklat@dephut.go.id; website : <http://portal.pusdiklatsdmlhk.id>

RENCANA KERJA TAHUNAN
PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL (PEN)
PUSAT DIKLAT SDM
LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
TAHUN 2020



SEPTEMBER, 2020



KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SDM
PUSAT DIKLAT SDM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

KEPUTUSAN
KEPALA PUSAT DIKLAT SDM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
Nomor : SK.202/DIK/PU/WAS.0/9/2020
Tentang

**PERUBAHAN KETIGA RENCANA KERJA PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL (PEN)
KEPUTUSAN KEPALA PUSAT DIKLAT SDM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN NOMOR
SK.409/DIK/PU/WAS.0/11/2019 TENTANG RENCANA KERJA TAHUNAN (RKT) SATUAN
KERJA (SATKER) PUSAT DIKLAT SDM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TAHUN 2020**

KEPALA PUSAT,

- Menimbang : a. bahwa Pusat Diklat SDM Lingkungan Hidup dan Kehutanan merupakan unsur penunjang pelaksanaan tugas Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di bidang pendidikan dan pelatihan SDM;
- b. Bahwa dengan adanya situasi pandemi COVID-19 menyebabkan pelambatan ekonomi pada seluruh lapisan masyarakat, tidak terkecuali aktivitas ekonomi di tingkat tapak maka dipandang perlu menetapkan Rencana Kerja Tahunan (RKT) Pemulihan Ekonomi Nasional Satker Pusat Diklat SDM Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020 dengan Keputusan Kepala Pusat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang R.I No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disesase 2019* (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan
3. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 Tentang Perencanaan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4452);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2010 tentang penelitian dan pengembangan, serta pendidikan dan pelatihan kehutanan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS sebagai pengganti PP Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4019);
7. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2019 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2020;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/MenLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
10. Peraturan Menteri

10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.39/Menlhk-Setjen/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.51/MenLHK/Setjen/Kum.1/10/2017 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
12. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.9/MENLHK/SETJEN/KUM.1/3/2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Sipil Negara dan Non Aparatur Sipil Negara di Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
13. Surat Edaran Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SE.1/MENLHK/SETJEN/SET.1/3/2020 tentang Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease-2019 (COVID-19)

MEMUTUSKAN

- Menetapkan: KEPUTUSAN KEPALA PUSAT DIKLAT SDM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TENTANG RENCANA KERJA TAHUNAN (RKT) PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL (PEN) SATKER PUSAT DIKLAT SDM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TAHUN 2020.
- KESATU : Rencana Kerja Tahunan (RKT) Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Satker Pusat Diklat SDM Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020, sebagaimana lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Rencana Kerja Tahunan (RKT) Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Satker Pusat Diklat SDM Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020 ini disusun untuk dijadikan acuan bagi Pusat Diklat SDM Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya pada tahun 2020.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bogor
Pada tanggal : 10 September 2020

Plt. KEPALA PUSAT



MARIANA LUBIS
NIP. 19621112 199101 2 001

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
2. Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
4. Kepala Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
5. Kepala Pusat lingkup BP2SDM.

Lampiran Keputusan Kepala Pusat Diklat SDM Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Nomor : SK.202/DIK/PU/WAS.0/9/2020

Tanggal : 10 September 2020

**RENCANA KERJA TAHUNAN (RKT)
PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL (PEN)
SATKER PUSAT DIKLAT SDM LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN TAHUN 2020**

KATA PENGANTAR



Rencana Kerja adalah dokumen perencanaan suatu instansi pemerintah untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan pedoman untuk pelaksanaan kinerja suatu instansi pemerintah.

Penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT) Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Pusat Diklat SDM Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020 dalam rangka mendukung program Pemulihan Ekonomi Nasional khususnya di bidang peningkatan ketahanan pangan nasional terpadu serta menunjang kegiatan pendampingan yang dilaksanakan oleh tenaga pendamping, diperlukan peningkatan pengetahuan dan kapasitas tenaga pendamping untuk menjawab berbagai kebutuhan dan permasalahan yang dihadapi petani pemegang ijin perhutanan sosial. Untuk mendukung program PEN tersebut terdapat penambahan kegiatan baru yaitu Pelatihan Agroforestri bagi KTH dan KUPS serta Pelatihan bagi pendamping.

Akhirnya kami berharap Rencana Kerja Tahunan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Pusat Diklat SDM Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020 ini dapat diimplementasikan dan bermanfaat sebagai panduan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kinerja tahunan.

Bogor, September 2020
Plt. Kepala Pusat,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Mariana Lubis'.

Ir. Mariana Lubis, MM.
NIP. 19621112 199101 2 001

DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR GAMBAR	iii
DAFTAR TABEL	iv
I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi	2
C. Struktur Organisasi dan SDM	3
II. CAPAIAN KINERJA TAHUN 2018 DAN TAHUN 2019	7
A. Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Tahun 2018 dan Tahun 2019	7
B. Capaian Serapan Anggaran Tahun 2018 dan Tahun 2019	16
III. RENCANA KERJA TAHUN 2020	17
A. Strategi dalam mendukung Program KLHK dan Program Prioritas Nasional ..	17
B. Kegiatan, Sasaran Kegiatan, Unit Kegiatan dan Elemen Kegiatan Tahun 2020	19
IV. PENUTUP	48
IV. LAMPIRAN	49

DAFTAR GAMBAR

	Hal
Gambar 1. Struktur Organisasi Pusat Diklat SDM LHK.....	4
Gambar 2. Prioritas Nasional BP2SDM Tahun 2020-2024.....	18
Gambar 3. Website http://portal.pusdiklatsdmlhk.id	25
Gambar 4. Kegiatan SMK Kehutanan.....	31
Gambar 5. Pelatihan Pembentukan Polhut Fase II.....	32
Gambar 6. Kegiatan Pembukaan Pelatihan Pembentukan Fungsional	33
Gambar 7. Kegiatan Presentasi Hasil Studi Karyasiswa Program Doktor (S3)	35
Gambar 8. Kegiatan Audit ISO 9001 : 2015 oleh PT. IMS International	40
Gambar 9. Sarana Olahraga Indoor dan Outdoor Pusat Diklat SDM LHK.....	44
Gambar 10. Kendaraan Bermotor Inventaris Pusat Diklat SDM LHK	45
Gambar 11. Ruang Serbaguna dan Ruang Makan Asrama Pusat Diklat SDM LHK.....	45
Gambar 12. Kondisi Asrama dan Dapur Pusat Diklat SDM LHK.....	46

DAFTAR TABEL

	Hal
Tabel 1. Keadaan Pegawai pada Pusat Pendidikan dan Pelatihan SDM Lingkungan Hidup dan Kehutanan berdasarkan Jabatan.....	5
Tabel 2. Keadaan Pegawai pada Pusat Pendidikan dan Pelatihan SDM Lingkungan Hidup dan Kehutanan berdasarkan Golongan.....	5
Tabel 3. Keadaan Pegawai pada Pusat Pendidikan dan Pelatihan SDM Lingkungan Hidup dan Kehutanan berdasarkan pendidikan Tahun 2019	6
Tabel 4. Capaian kinerja pada indikator kinerja lingkup Pusat Diklat SDM LHK (termasuk BDLHK dan SMK) tahun 2018.....	8
Tabel 5. Indikator kinerja Pusdiklat SDM LHK tahun 2019	11
Tabel 6. Capaian kinerja pada indikator kinerja lingkup Pusat Diklat SDM LHK Tahun 2019	13
Tabel 7. Kronologis Revisi Anggaran DIPA APBN Pusat Diklat SDM LHK Tahun 2019	16
Tabel 8. Indikator kinerja Pusdiklat SDM LHK tahun 2020	20

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pusat Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Pusdiklat SDM LHK) sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.18/MENLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mempunyai tugas melaksanakan pendidikan dan pelatihan bagi Aparatur Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut, Pusat Diklat SDM LHK melakukan penyusunan Rencana Kerja Tahunan.

Penyusunan rencana kerja tahunan merupakan penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis tahun 2020-2014, yang akan dilaksanakan oleh Pusat Diklat SDM LHK melalui berbagai kegiatan tahun 2020. Di dalam rencana kerja tahun 2020 ditetapkan rencana capaian kerja untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan.

Rencana kerja tahunan Pusdiklat SDM LHK tahun 2020 merupakan acuan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sekaligus sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan administrasi dalam tahun anggaran 2020. Dalam rangka memenuhi sasaran tugas dan fungsi Pusdiklat SDM LHK perlu diambil langkah-langkah seoptimal mungkin melalui penyusunan rencana kegiatan berdasarkan skala prioritas didukung dengan tertib hukum dan tertib administrasi dan keuangan.

Pada Tahun 2020, terjadi bencana pandemic Corona virus Disease-2019 (COVID-19) yang melanda dunia dan juga Indonesia yang membawa resiko bagi Kesehatan dan menimbulkan korban jiwa. Atas dasar situasi tersebut Pemerintahan Republik Indonesia mengeluarkan kebijakan untuk menanggulangi penanganan pandemi Corona virus Disease-2019 (COVID-19) dan dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional atau Stabilitas Sistem Keuangan melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 dan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020. Dengan terbitnya dua peraturan tersebut Pusat Diklat SDM Lingkungan Hidup dan Kehutanan melakukan penyesuaian kegiatan dikarenakan ada

kebijakan refocusing anggaran yang mengakibatkan pemotongan pagu anggaran sehingga anggaran Pusdiklat menjadi Rp34.209.312.000.

Pada Bulan Agustus tahun 2020 terdapat agenda program pemerintah yakni Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Program Pemulihan Ekonomi Nasional merupakan salah satu rangkaian kegiatan untuk mengurangi dampak Covid-19 terhadap perekonomian. Selain penanganan krisis kesehatan, Pemerintah juga menjalankan program PEN sebagai respon atas penurunan aktivitas masyarakat yang berdampak pada ekonomi, khususnya sektor informal atau UMKM. Salah satu kegiatan kehutanan yang potensial untuk membantu meningkatkan ekonomi masyarakat di tingkat tapak adalah pengembangan agroforestry. Dalam hal ini, Pusat Diklat SDM LHK memberikan dukungan pada bidang peningkatan ketahanan pangan (*Food Estate*) melalui pelatihan agroforestry dan pendampingan kelompok. Untuk dapat melaksanakan kegiatan tersebut Pusat Diklat SDM LHK mendapatkan penambahan anggaran sebesar Rp6.260.000.000,00 sehingga anggaran Pusat Diklat SDM LHK menjadi Rp40.469.312.000,00 serta mengakibatkan penambahan volume keluaran sebanyak 2.665 orang menjadi 4.311 orang.

Dengan adanya pagu anggaran tersebut, disusunlah kegiatan-kegiatan yang dijabarkan dalam Rencana Kerja Tahunan Perubahan Tahun 2020.

B. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

1. Kedudukan

Pusdiklat SDM LHK merupakan perangkat organisasi atau unit kerja eselon II yang dalam pelaksanaan tugas dan fungsi kegiatan berada di bawah Badan P2SDM, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. Pusdiklat SDM LHK dipimpin oleh Kepala Pusat.

2. Tugas Pokok

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.18/MenLHK-II/2015 tanggal 14 April 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, bahwa Pusdiklat SDM LHK mempunyai tugas melaksanakan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur dan Non Aparatur Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

3. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas tersebut Pusdiklat SDM LHK menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- 1) Penyusunan rencana, program, kerjasama dan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia aparatur Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- 2) Penyiapan perumusan kebijakan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia aparatur lingkungan hidup dan kehutanan;
- 3) Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia aparatur lingkungan hidup dan kehutanan;
- 4) Bimbingan teknis dan evaluasi pemberian bimbingan teknis penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia aparatur lingkungan hidup dan kehutanan; dan
- 5) Pelaksanaan administrasi Pusat.

C. Struktur Organisasi dan SDM

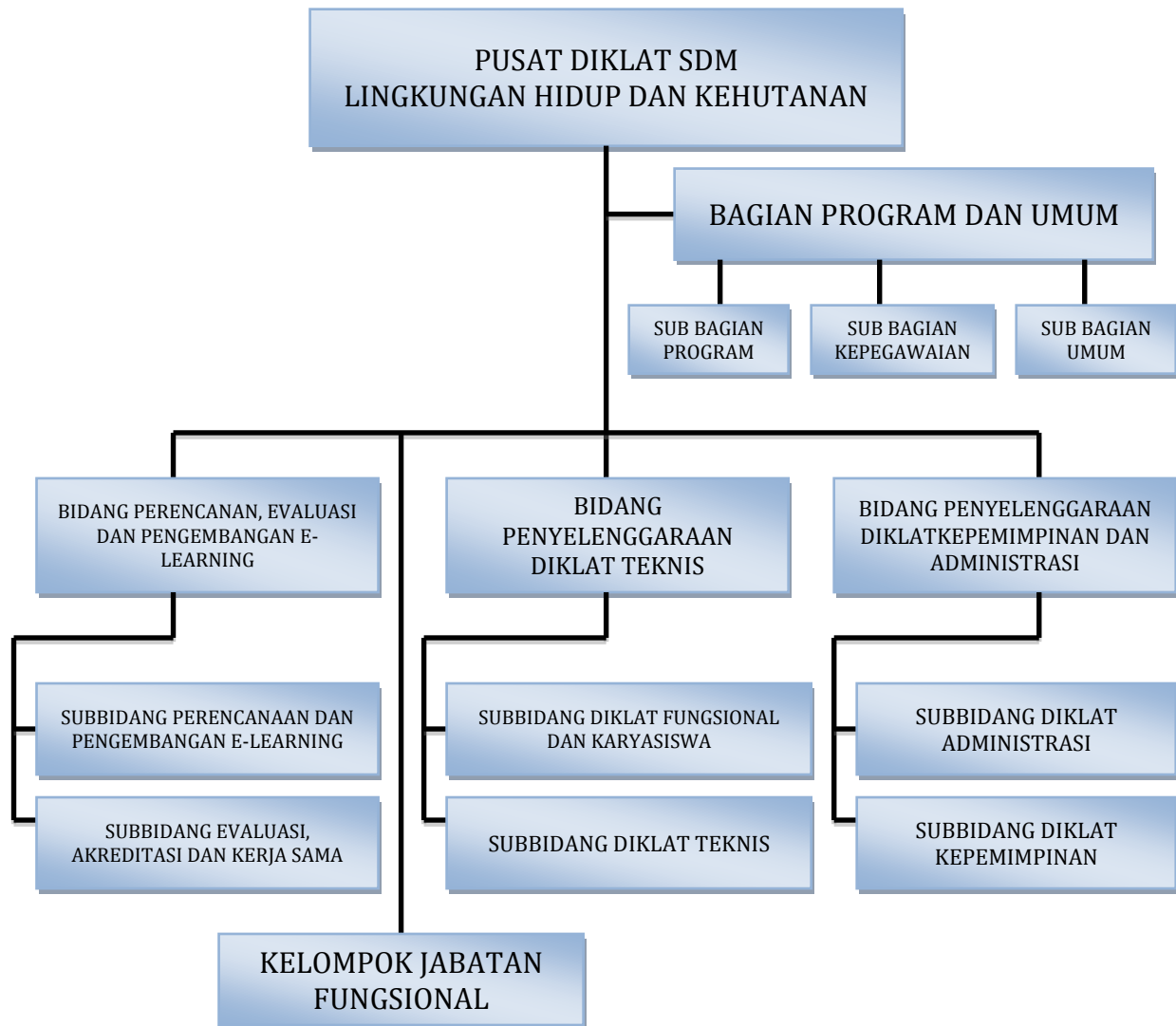
1. Struktur Organisasi

Berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.18/MenLHK-II/2015 tanggal 14 April 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Pusdiklat SDM LHK terdiri atas :

1. Bidang Perencanaan, Evaluasi dan Pengembangan E-Learning mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis perencanaan, evaluasi dan pengembangan pembelajaran secara elektronik.
2. Bidang Penyelenggaraan Diklat Teknis mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsional aparatur dan non aparatur.
3. Bidang Penyelenggaraan Diklat Kepemimpinan dan Administrasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, dan pelatihan kepemimpinan dan administrasi.

4. Bagian Program dan Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan program, anggaran, keuangan, ketatausahaan, rumah tangga, perlengkapan, kepegawaian dan umum.

Gambar struktur organisasi Pusdiklat SDM LHK disajikan pada Gambar 1.



Gambar 1. Struktur Organisasi Pusat Diklat SDM LHK

2. Sumber Daya Manusia

Jumlah Pegawai Pusdiklat SDM LHK Tahun 2020 per 01 September 2020 adalah sebanyak 107 orang, terdiri dari pejabat Struktural sebanyak 11 orang, pejabat Fungsional Widyaiswara sebanyak 33 orang, pejabat Fungsional Umum sebanyak 61 orang dan CPNS sebanyak 2 Orang. Keadaan pegawai di Pusat Pendidikan dan Pelatihan

SDM LHK berdasarkan jabatan dan golongan per tanggal 01 September 2020 dapat dilihat pada tabel 1 dan 2.

Tabel 1. Keadaan Pegawai pada Pusat Pendidikan dan Pelatihan SDM Lingkungan Hidup dan Kehutanan berdasarkan Jabatan per tanggal 01 September 2020

No.	Jabatan	Jumlah (Orang)
1	Struktural	11
2	Fungsional Widyaiswara	33
3	Fungsional Umum	61
4	CPNS	2
Jumlah		107

Sumber data : Sub Bagian Kepegawain Pusdiklat SDM Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Tabel 2. Keadaan Pegawai pada Pusat Pendidikan dan Pelatihan SDM Lingkungan Hidup dan Kehutanan berdasarkan Golongan per tanggal 01 September 2020

Instansi	Golongan													Jumlah (Orang)
	IV					III				II				
	a	b	c	d	e	a	b	c	d	A	b	c	d	
Pusat Diklat SDM LHK	8	7	5	8	5	7	31	6	15	1	2	4	8	107
Jumlah	33					59				15				107

Sumber data : Sub Bagian Kepegawaian Pusdiklat SDM LHK

Tabel 3.Keadaan Pegawai pada Pusat Pendidikan dan Pelatihan SDM Lingkungan Hidup dan Kehutanan berdasarkan pendidikan per tanggal 01 September 2020

No.	Pendidikan	Jumlah (Orang)
1	Doktor / Ph.D / S-3	12
2	Master / Magister / S-2	32
3	Sarjana / S-1	20
4	Diploma	6
5	SLTA	32
6	SLTP	4
7	SD	1
Jumlah		107

CAPAIAN KINERJA TAHUN 2018 DAN TAHUN 2019

A. Capaian Kinerja Tahun 2018 dan Tahun 2019

1. Capaian Indikator Kinerja Lingkup Pusdiklat SDM Lingkungan Hidup dan Kehutanan (termasuk BDLHK dan SMK Kehutanan) Tahun 2018

Padatahun 2018 Pusat Diklat SDM LHK menetapkan 2 (dua) kegiatan yaitu :

- a. Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur dan Non Aparatur LHK
- b. Penyelenggaraan Pendidikan Menengah Kejuruan Kehutanan

Kegiatan tersebut dicapai melalui 6 (enam) Indikator Kinerja, yaitu :

- 1) Tersedianya kapasitas SDM Aparatur LHK;
- 2) Tersedianya lulusan S2 dan S3;
- 3) Tersedianya KHDTK;
- 4) Tersedianya tenaga bakti rimbawan;
- 5) Tersedianya tenaga pendamping KTH; dan
- 4) Tersedianya tenaga teknis Menengah Kejuruan Kehutanan.

Capaian kinerja pada indicator kinerja lingkup Pusat Diklat SDM LHK (termasuk BDLHK dan SMKK) tahun 2018 dapat dijelaskan dalam tabel di bawah ini :

Tabel 4. Capaian Kinerja pada Indikator Kinerja Lingkup Pusat Diklat SDM LHK Tahun 2018

Kegiatan		Indikator Kinerja Kegiatan		Target 2018		Realisasi 2018		% Capaian	Output Kegiatan TA. 2018
1.	Penyelenggaraan Diklat Aparatur LHK	a.	Jumlah kapasitas SDM aparatur dan non aparatur LHK dalam bidang diklat administrasi, teknis dan fungsional meningkat	2996	Orang	2996	Orang	100	Pusdiklat SDM LHK 626 orang, BDLHK Bogor 330 orang, BDLHK Kadipaten 330 orang, BDLHK Pematangsiantar 330 orang, BDLHK Pekanbaru 330, BDLHK Samarinda 330 orang, BDLHK Makassar 390 orang, BDLHK Kupang 330 orang
		b.	Tersedianya SDM LHK yang lulus pendidikan karyasiswa (S2 dan S3), 340 orang	85	orang	85	orang	100	S2 sebanyak 23 orang dan S3 sebanyak 12 orang
		c.	Terbentuknya unit KHDTK sebagai sarana pembelajaran	4	unit	4	unit	100	- Balai Diklat LHK Pekanbaru - Balai Diklat LHK

Kegiatan		Indikator Kinerja Kegiatan		Target 2018		Realisasi 2018		% Capaian	Output Kegiatan TA. 2018
			kediklatan, 2 unit KHDTK						Kadipaten - Balai Diklat LHK Samarinda - Balai Diklat LHK Maklassar
		d.	Tersedianya tenaga bakti rimbawan yang meningkat kapasitasnya, 230 orang	230	Orang	230	Orang	100	Diklat Tenaga Bakti Rimbawan sebanyak: 230 orang - BDLHK Pekanbaru 61 orang - BDLHK Samarinda 99 orang - BDLHK Makassar 70 orang
		e.	Tersedianya tenaga pendamping KTH dalam pemberdayaan masyarakat di desa-desa hutan meningkat kapasitasnya 300 orang	300	orang	300	orang	100	Diklat dilaksanakan di: - BDLHK P.Siantar sebanyak 30 orang - BDLHK Kupang sebanyak 30 orang - BDLHK Pekanbaru sebanyak 30 orang - BDLHK Makassar sebanyak 60 orang - BDLHK Kadipaten sebanyak 60 orang - BDLHK Bogor sebanyak 60 orang - BDLHK Samarinda sebanyak 30 orang

Kegiatan		Indikator Kinerja Kegiatan	Target 2018		Realisasi 2018		% Capaian	Output Kegiatan TA. 2018
2.	Penyelenggaraan pendidikan menengah kejuruan kehutanan	Tersedianya tenaga teknis menengah kejuruan kehutanan, 2.300 orang	457	orang	455	orang	99.56	Lulusan Siswa/Siswi SMK Kehutanan Tahun 2018: - SMK Kehutanan Negeri Kadipaten: 106 Orang. - SMK Kehutanan Negeri Pekanbaru : 99 Orang. - SMK Kehutanan Negeri Samarinda : 101 Orang. - SMK Kehutanan Negeri Makassar : 90 Orang. - SMK Kehutanan Negeri Manokwari : 59 Orang

Pengukuran capaian kinerja Pusat Diklat SDM Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2018 memberi kesimpulan bahwa capaian kinerja Pusat Diklat SDM Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2018 dan capaian kinerja fisik Pusat Diklat SDM LHK untuk meningkatkan kapasitas SDM yang kompeten dan profesional untuk mendukung pembangunan bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebesar 99,56%, masuk dalam penilaian kinerja dengan predikat memuaskan.

Sama seperti tahun 2018, pada tahun 2019 Pusat Diklat SDM LHK menetapkan 2 (dua) kegiatan. Indikator kinerja Pusdiklat SDM LHK tahun 2019, sebagaimana ditunjukkan pada tabel di bawah ini :

Tabel 5. Indikator kinerja Pusdiklat SDM LHK tahun 2019

Kegiatan/Sasaran (1)	Indikator Kinerja Kegiatan (Output) (2)
<i>Penyelenggaraan Diklat Aparatur dan Non Aparatur SDM LHK</i> Sasaran: Meningkatnya kapasitas SDM LHK	a. Jumlah kapasitas SDM aparatur dan non aparatur LHK dalam bidang diklat administrasi, teknis dan fungsional meningkat, 4.198 orang , terdiri dari 1.602 orang di Pusat Diklat SDM LHK dan 2.596 orang di 7 (tujuh) Balai Diklat LHK (BDLHK Pekanbaru 389 orang, BDLHK Bogor 300 orang, BDLHK Makassar 515 orang, BDLHK Samarinda 398 orang, BDLHK Kupang 300 orang, BDLHK Pematangsiantar 300 orang, BDLHK Kadipaten 394 orang)
	b. Jumlah SDM LHK yang lulus pendidikan karya siswa (S2 dan S3), 75 orang . Terdiri dari S2 = 65 orang, S3 = 10 orang.
	c. Jumlah unit KHDTK sebagai sarana pembelajaran kediklatan, 7 unit KHDTK (BDLHK Makasar, BDLHK Pekanbaru, BDLHK Samarinda, BDLHK Kadipaten, BDLHK Bogor, BDLHK Pematangsiantar, BDLHK Kupang)

Kegiatan/Sasaran (1)	Indikator Kinerja Kegiatan (Output) (2)
	d. Jumlah tenaga pendamping kelompok tani hutan yang meningkat kapasitasnya, 300 orang . Terdiri dari BDLHK Pekanbaru 60 orang, BDLHK Bogor 30 orang, BDLHK Makasar 60 orang, BDLHK Samarinda 30 orang, BDLHK Kupang 30 orang, BDLHK Pematangsiantar 30 orang, BDLHK Kadipaten 60 orang.
<i>Penyelenggaraan Pendidikan Menengah Kejuruan Kehutanan</i> Sasaran: Tersedianya tenaga teknis menengah kehutanan	Jumlah tenaga teknis menengah kejuruan kehutanan sebanyak 448 orang , terdiri dari : SMKKN Kadipaten 94 orang, SMKKN Pekanbaru 102 orang, SMKKN Makassar 97 orang, SMKKN Samarinda 109 orang, SMKKN Manokwari 46 orang

Pusat Diklat SDM LHK sampai dengan Desember 2019 mempunyai realisasi anggaran sebesar 97,88%. Berikut adalah tabel rincian capaian masing-masing IKK :

Tabel 6. Capaian Kinerja pada Indikator Kinerja Lingkup Pusat Diklat SDM LHK (termasuk BDLHK dan SMKK) Tahun 2019

Kegiatan		Indikator Kinerja Kegiatan		Target 2019		Realisasi s.d. Desember 2019		% Capaian	Output Kegiatan TA. 2019
1.	Penyelenggaraan Diklat Aparatur LHK	a.	Jumlah kapasitas SDM aparatur dan non aparatur LHK dalam bidang diklat administrasi, teknis dan fungsional meningkat	4.198	Orang	4.190	Orang	99.80	Pusdiklat SDM LHK 1.596 orang, BDLHK Bogor 300 orang, BDLHK Kadipaten 394 orang, BDLHK Pematangsiantar 300 orang, BDLHK Pekanbaru 389, BDLHK Samarinda 398 orang, BDLHK Makassar 515 orang, BDLHK Kupang 298 orang
		b.	Tersedianya SDM LHK yang lulus pendidikan karya siswa (S2 dan S3), 340 orang	75	orang	75	orang	100.00	S2 sebanyak 60 orang dan S3 sebanyak 15 orang
		c.	Terbentuknya unit KHDTK sebagai sarana pembelajaran kediklatan, 7 unit KHDTK	7	unit	7	unit	100.00	- Balai Diklat LHK Pekanbaru - Balai Diklat LHK Kadipaten - Balai Diklat LHK Samarinda

Kegiatan		Indikator Kinerja Kegiatan		Target 2019		Realisasi s.d. Desember 2019		% Capaian	Output Kegiatan TA. 2019
									- Balai Diklat LHK Makassar - Balai Diklat LHK Bogor - Balai Diklat LHK Kupang - Balai Diklat LHK Pematangsiantar
		e.	Tersedianya tenaga pendamping KTH dalam pemberdayaan masyarakat di desa-desa hutan meningkat kapasitasnya 300 orang	300	orang	300	orang	100.00	Diklat dilaksanakan di: - BDLHK P.Siantar sebanyak 30 orang - BDLHK Kupang sebanyak 30 orang - BDLHK Pekanbaru sebanyak 60 orang - BDLHK Makassar sebanyak 60 orang - BDLHK Kadipaten sebanyak 60 orang - BDLHK Bogor sebanyak 30 orang

Kegiatan		Indikator Kinerja Kegiatan	Target 2019		Realisasi s.d. Desember 2019		% Capaian	Output Kegiatan TA. 2019
2.	Penyelenggaraan pendidikan menengah kejuruan kehutanan	Tersedianya tenaga teknis menengah kejuruan kehutanan, 2.300 orang	448	orang	446	orang	99.55	Lulusan Siswa/Siswi SMK Kehutanan Tahun 2019: - SMK Kehutanan Negeri Kadipaten: 94 Orang. - SMK Kehutanan Negeri Pekanbaru : 101 Orang. - SMK Kehutanan Negeri Samarinda : 109 Orang. - SMK Kehutanan Negeri Makassar : 97 Orang. - SMK Kehutanan Negeri Manokwari : 45 Orang

B. Capaian Serapan Anggaran Tahun 2018 dan Tahun 2019

Tahun 2019 pagu anggaran yang diberikan kepada Pusdiklat SDM LHK adalah sebesar Rp 52.554.509.000,-. Berikut adalah kronologis revisi anggaran DIPA yang dilakukan oleh Pusat Diklat SDM LHK Tahun Anggaran 2019 :

Tabel.7 Kronologis Revisi Anggaran DIPA APBN Pusat Diklat SDM LHK Tahun 2019

NO	URAIAN	PAGU (Rp)	NOMOR PENGESAHAN
1	DIPA APBN	52.554.509.000	SP DIPA – 029.08.1.400210/2019 Tanggal 5 Desember 2018
2	REVISI-1	52.554.509.000	SP DIPA – 029.08.1.400210/2019 Tanggal 17 Januari 2019
3	REVISI-2	52.554.509.000	SP DIPA – 029.08.1.400210/2019 Tanggal 28 Maret 2019
4	REVISI-3	52.554.509.000	SP DIPA – 029.08.1.400210/2019 Tanggal 28 Mei 2019
5	REVISI-4 (DJA)	52.554.509.000	SP DIPA – 029.08.1.400210/2019 Tanggal 25 Juni 2019
6	REVISI-5	52.554.509.000	SP DIPA – 029.08.1.400210/2019 Tanggal 22 Juli 2019
7	REVISI-6 (Dana Insentif)	59.774.884.000	SP DIPA – 029.08.1.400210/2019 Tanggal 07 Agustus 2019
8	REVISI-7 (DJA)	62.326.918.000	SP DIPA – 029.08.1.400210/2019 Tanggal 05 September 2019
9	REVISI-8	62.326.918.000	SP DIPA – 029.08.1.400210/2019 Tanggal 30 September 2019
10	REVISI-9	62.326.918.000	SP DIPA – 029.08.1.400210/2019 Tanggal 12 November 2019

Dalam tabel diatas terlihat bahwa dari diperolehnya DIPA APBN tanggal 5 Desember 2018 sampai dengan revisi ke 5 yaitu tanggal 22 Juli 2019 anggaran tidak mengalami perubahan nilai, akan tetapi hanya dilakukan antara lain : revisi pejabat perbendaharaan, revisi antar output, perubahan penarikan halaman III DIPA, dan mengubah belanja barang ke belanja modal. Sedangkan untuk revisi ke 6 yang disahkan pada tanggal 07 Agustus 2019 terjadi perubahan besaran anggaran sebesar Rp7.220.375.000,-. Hal tersebut dikarenakan adanya pergeseran anggaran dari BA BUN Pengelolaan Belanja Lainnya (BA 999.08) ke BA Kementerian LHK (BA 029) untuk Insentif TA 2019 atas Kinerja Anggaran Kementerian LHK TA 2018 pada Program Peningkatan Penyuluhan dan Pengembangan SDM. Selain itu pada revisi ke 7 yang disahkan pada tanggal 05 September 2019 terjadi penambahan anggaran belanja pegawai sebesar Rp2.552.034.000,-.

RENCANA KERJA TAHUN 2020

- A. Strategi dalam mendukung Program Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Program Prioritas Nasional.
- a. Strategi dalam mendukung Program Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kementerian Lingkungan Hidup pada tahun 2020 telah membuat arah pembangunan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yaitu:
1. Memperkuat ekonomi nasional, investasi, dan ekspor melalui:
 - Deregulasi Perizinan yang menghambat
 - Pemberian Insentif
 - Kepastian Hukum
 2. Melakukan pengentasan kemiskinan melalui perhutanan sosial, TORA dan pendampingan usaha pada kelompok masyarakat dan kelompok tani hutan mandiri.
 3. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan kehutanan melalui rehabilitasi DAS, perlindungan dan pengamanan KK, pengendalian pencemaran, pengelolaan sampah, penegakan hukum, pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan serta restorasi lahan gambut.
 4. Pembangunan infrastruktur yang langsung dirasakan masyarakat
 5. Penguatan pendidikan vokasional untuk menghasilkan SDM yang siap kerja
 6. Penguatan program yang menyerap tenaga kerja masyarakat dalam jumlah besar.

Pusdiklat SDM LHK sebagai instansi yang mempunyai tugas dan fungsi untuk melaksanakan diklat bagi aparatur maupun non aparatur SDM LHK bertujuan untuk mencetak aparatur maupun non aparatur SDM LHK yang berwawasan lingkungan dan mampu melaksanakan tugas secara profesional dalam pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan sehingga dapat mewujudkan tujuan pembangunan kehutanan serta program-program kehutanan yang telah disusun oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

b. Strategi dalam mendukung Program Prioritas Nasional

Visi Presiden - Wakil Presiden Republik Indonesia yaitu “Terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian yang berlandaskan gotong royong”. Misi Presiden - Wakil Republik Indonesia : Upaya meneruskan jalan perubahan untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong di tempuh dengan sembilan misi:

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdayasaing
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga
8. Pengelolaan pemerintah yang bersih, efektif dan terpercaya
9. Sinergi pemerintah daerah dalam rangka negara kesatuan

PRIORITAS NASIONAL BP2SDM

Berdasarkan Paparan Rancangan Renstra BP2SDM tahun 2020-2024

Prioritas Nasional	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Proyek Prioritas Nasional	Kegiatan dalam Renja K/L	Output dalam Renja K/L
PN 3 - Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing	PP 5 - Pengentasan Kemiskinan	KP 2 - Keperantaraan Usaha dan Dampak Sosial	Pro PN 3 - Penyuluhan dan/atau Pendampingan bagi kelompok masyarakat lingkungan hidup dan kehutanan	Peningkatan Penyuluhan	Pembentukan KTH Mandiri untuk pelatihan vokasi kehutanan bagi kelompok masyarakat
					Pembentukan Lembaga Pelatihan Pemagangan Usaha Kehutanan Swadaya Masyarakat /LP2UKS bagi Masyarakat
	PP 6 - Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing	KP 1 - Pendidikan dan Pelatihan Vokasi Berbasis Kerjasama Industri	Pro PN 2 - Reformasi Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	Penyelenggaraan Pendidikan Menengah Kejuruan Kehutanan	Peningkatan kapasitas penyuluh dan/atau pendamping yang handal bagi kelompok masyarakat
					Tenaga teknis menengah kejuruan kehutanan yang tersedia
PN 6 - Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	PP 1 - Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup	KP 1 - Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Pro PN 4 - Penguatan Sistem Sertifikasi Kompetensi	Perencanaan dan Pengembangan SDM	Peningkatan Sertifikasi dan/atau Kompetensi ASN KLHK
					Peningkatan Sertifikasi dan/atau Kompetensi nonaparatur LHK
			Pro PN 5 - Peningkatan Kesadaran dan Kapasitas Pemerintah, Swasta dan Masyarakat terhadap Lingkungan Hidup	Penyelenggaraan Pelatihan Masyarakat dan Pengembangan Generasi Lingkungan	Pembinaan Sekolah dan Madrasah yang peduli dan berbudaya lingkungan hidup
					Pembinaan Lembaga/Komunitas yang melaksanakan gerakan masyarakat bela lingkungan.
					Pembinaan pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan secara lestari kepada masyarakat

Gambar 2. Prioritas Nasional BP2SDM Tahun 2020-2024

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Pusat Diklat SDM LHK yang dijelaskan Dalam P.18/MENLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Bagian Keenam Pasal 1300, strategi untuk mendukung program prioritas tersebut di atas terutama dalam bidang pendidikan adalah dengan menyelenggarakan Diklat aparatur dan non aparatur Negara dengan sebaik-baiknya, meningkatkan kapasitas tenaga kediklatan, melakukan pembinaan penyelenggaraan pendidikan SMK Kehutanan, meningkatkan kapasitas tenaga kependidikan, mengembangkan pengelolaan pendidikan pasca sarjana, membina dan mengembangkan organisasi diklat, melakukan pembinaan pengelolaan kawasan hutan diklat, dan melakukan pembinaan pengelolaan sarana dan prasarana diklat dan pendidikan yang kemudian dijabarkan lagi dengan indikator kinerja kegiatan.

B. Kegiatan, Sasaran Kegiatan, Unit Kegiatan dan Elemen Kegiatan Tahun 2020

Adanya situasi pandemi COVID-19 menyebabkan pelambatan ekonomi pada seluruh lapisan masyarakat, tidak terkecuali aktivitas ekonomi di tingkat tapak termasuk KTH Perhutanan Sosial.

Dalam rangka mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah menyelenggarakan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang merupakan salah satu rangkaian kegiatan untuk mengurangi dampak COVID-19 terhadap perekonomian. PEN merupakan respon pemerintah selain penanganan krisis kesehatan, atas penurunan aktivitas masyarakat yang berdampak pada ekonomi, khususnya sektor informal atau UMKM. Program ini bertujuan melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan kemampuan ekonomi para pelaku usaha dalam menjalankan usahanya selama pandemi COVID-19. Strategi utama Perhutanan Sosial meliputi dua hal, yakni [1] Pemberian Akses Kelola Program Perhutanan Sosial, dan [2] Peningkatan kapasitas Usaha Pogram Perhutanan Sosial. Oleh karena itu diperlukan program pendampingan untuk mencapai 2 hal tersebut, baik melalui penguatan kapasitas kelembagaan KTH maupun pemberian bimbingan teknis kepada KTH. Melalui Pendampingan, KTH diharapkan dapat mandiri dan berdaya saing dalam mengembangkan usaha perhutanan sosialnya. Dalam rangka mendukung program Pemulihan Ekonomi Nasional khususnya di bidang peningkatan ketahanan pangan nasional terpadu serta menunjang kegiatan pendampingan yang dilaksanakan oleh tenaga pendamping, diperlukan peningkatan pengetahuan dan

kapasitas tenaga pendamping untuk menjawab berbagai kebutuhan dan permasalahan yang dihadapi petani pemegang ijin perhutanan sosial.

Melihat kondisi tersebut, Badan P2SDM melalui Pusat Diklat SDM LHK melaksanakan kegiatan peningkatan kapasitas bagi pendamping kelompok penerima akses perhutanan sosial dalam bentuk pelatihan dan pendampingan.

Pusdiklat SDM LHK dengan adanya program Peningkatan Ekonomi Nasional (PEN) mendapat tambahan pagu anggaran sebesar Rp6.260.000.000,00 anggaran tersebut di pergunakan untuk mengadakan pelatihan bagi para pendamping sebanyak 93 orang, dan 2.665 orang bagi para anggota KTH dan KUPS. Dengan adanya penambahan tersebut mengakibatkan terjadi penambahan target IKK sebagaimana ditunjukkan pada tabel di bawah ini :

Tabel 8. Indikator Kinerja Pusdiklat SDM LHK tahun 2020

Kegiatan/Sasaran (1)	Indikator Kinerja Kegiatan (Output) (2)
<i>Penyelenggaraan Diklat Aparatur dan Non Aparatur SDM LHK</i> Sasaran: Meningkatnya kapasitas SDM LHK	a. Jumlah kapasitas SDM aparatur dan non aparatur LHK dalam bidang diklat administrasi, teknis dan fungsional meningkat, 9.617 orang , terdiri dari 4.838 orang di Pusat Diklat SDM LHK dan 4.779 orang di 7 (tujuh) Balai Diklat LHK (BDLHK Pekanbaru 690 orang, BDLHK Bogor 660 orang, BDLHK Makassar 789 orang, BDLHK Samarinda 660 orang, BDLHK Kupang 660 orang, BDLHK Pematangsiantar 660 orang, BDLHK Kadipaten 660 orang)
	b. Jumlah SDM LHK yang lulus pendidikan karya siswa (S2 dan S3), 23 orang . Terdiri dari S2 = 20 orang, S3 = 3 orang.
	c. Nilai KHDTK yang dikelola 66,50 poin dengan Jumlah unit sebanyak 7 unit KHDTK (BDLHK Makasar, BDLHK Pekanbaru, BDLHK Samarinda, BDLHK Kadipaten, BDLHK Bogor, BDLHK Pematangsiantar, BDLHK Kupang)

Kegiatan/Sasaran (1)	Indikator Kinerja Kegiatan (Output) (2)
<i>Penyelenggaraan Pendidikan Menengah Kejuruan Kehutanan</i> Sasaran: Tersedianya tenaga teknis menengah kehutanan	Jumlah tenaga teknis menengah kejuruan kehutanan sebanyak 466 orang , terdiri dari : SMKKN Kadipaten 96 orang, SMKKN Pekanbaru 104 orang, SMKKN Makassar 94 orang, SMKKN Samarinda 102 orang dan SMKKN Manokwari 70 orang

Selain Perubahan diakibatkan dengan adanya Program PEN terdapat juga perubahan yang diakibat adanya revisi kegiatan, berikut adalah rincian dari kegiatan Pusat Diklat SDM LHK . Pada tahun 2020 terdapat 4 (empat) unit kegiatan. Unit kegiatan dan elemen kegiatan tersebut adalah :

1) Perencanaan, Evaluasi dan Pengembangan E-Learning, yang dijabarkan dalam elemen kegiatan :

a) Perencanaan dan Pengembangan E-Learning, komponen kegiatannya yaitu :

Pada elemen kegiatan ini terbagi menjadi dua output yaitu output SDM Aparatur dan Non Aparatur yang meningkat kapasitasnya dengan komponen yaitu Pendukung Kediklatan dan output Nilai KHDTK yang dikelola, dengan rincian sebagai berikut:

- **Pendukung Kediklatan**

Pendukung kediklatan adalah komponen dari output SDM Aparatur dan Non Aparatur LHK yang meningkat kapasitasnya, Yaitu kegiatan-kegiatan yang secara langsung mendukung kegiatan penyelenggaraan pelatihan adapun sub komponennya adalah:

- Hibah Luar Negeri

Pada tahun 2020, Pusat Diklat SDM LHK masih melanjutkan program hibah kerjasama dari Forest Investment Programe (FIP). Forest Investment Programe (FIP) bertujuan untuk mengurangi hambatan pelaksanaan mitigasi emisi dari deforestasi dan degradasi hutan (REDD+) di daerah serta untuk meningkatkan kapasitas pemerintah, dunia usaha dan masyarakat adat serta komunitas lokal tentang REDD+ dan pengelolaan hutan lestari di tingkat lokal dan provinsi. Indonesia sedang merencanakan

dan melaksanakan perubahan-perubahan signifikan dalam pengelolaan hutan. Forest Investment Program (FIP) berperan penting untuk mendukung proses ini. Sebelum ini pemerintah Indonesia melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) telah menetapkan pengelolaan hutan secara nasional berbasis Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH). Proyek FIP akan memperbaiki tata kelola hutan melalui sistem KPH yang diharapkan mengarah kepada perbaikan signifikan dalam hal lingkungan bisnis yang kondusif, peluang investasi dalam SFM, manajemen hutan berbasis komunitas (CBFM), dan REDD+. Pusat Diklat SDM LHK sebagai lembaga diklat kehutanan mempunyai tupoksi menyelenggarakan diklat serta menyediakan sarana dan metodologi kediklatan yaitu menyiapkan kurikulum dan modul diklat dalam pelaksanaannya. Kegiatan-kegiatan untuk mendukung program tersebut adalah : Pengembangan Kursil/Modul Baru (14 Komoditas), Training Workshop Blended Learning, Face to Face on Site Training (Blended Learning for Various Training), KPH Operationalization and Change Management Trainings, Central Level Administration-Knowledge Centre Developer, Competitions, Identifikasi Kebutuhan Diklat (IKD), dan Perencanaan Program Diklat Jangka Panjang. Anggaran untuk pelaksanaan kegiatan ini dalam pagu tahun 2020 sebesar **Rp2.783.259.000,-**.

- Penyusunan Modul dan Video Pelatihan

Pada saat ini Pusat Diklat SDM LHK sedang mengembangkan Pelatihan secara jarak jauh (e-learning) hal ini juga sejalan dengan program pemerintah dalam meminimalisir penyebaran Covid-19 yaitu dengan mengurangi kegiatan yang mengumpulkan banyak orang dan juga dengan pengembangan e-learning tingkat efisiensi penggunaan anggaran pun dapat tercapai. Dalam pelaksanaan e-learning tentu harus ditunjang dengan tersedianya materi dan bahan ajar. Pada tahun 2020 Pusat Diklat SDM LHK telah mengalokasikan untuk pembuatan materi dan bahan ajar anggaran sebesar **Rp350.000.000,-**.

- **Nilai KHDTK yang dikelola**

- Pengembangan KHDTK sebagai sarana Pembelajaran

Indikator kinerja kegiatan KHDTK adalah Nilai KHDTK yang dikelola. KHDTK sebagai sarana pembelajaran kediklatan KHDTK dalam pengelolaan kawasan, pemberdayaan masyarakat sekitar hutan, dan juga sarana prasarana penunjang pembelajaran. Untuk itu perlu dilakukan penilaian pengelolaan KHDTK di 7 (tujuh) KHDTK. Pada Tahun 2020 Indikator Kinerja Kegiatan nilai Pengelolaan KHDTK sebesar 66,50 poin.

Untuk mencapai indikator kinerja kegiatan di atas ditetapkan kebijakan meningkatkan pembinaan pengelolaan kawasan hutan diklat sehingga dapat dimanfaatkan secara optimal. Anggaran untuk membiayai kegiatan ini dalam pagu tahun 2020 adalah **Rp 100.000.000,-**.

b) Evaluasi, Akreditasi, dan Kerjasama, komponen kegiatannya yaitu :

Pada elemen kegiatan ini terbagi menjadi dua komponen kegiatan yaitu kegiatan dukungan manajemen dan pelaksana tugas serta kegiatan Penyelenggaraan Diklat Aparatur dan Non Aparatur dengan output SDM Aparatur dan Non Aparatur LHK yang meningkat kapasitasnya komponennya pendukung kediklatan, dengan rincian sebagai berikut:

- Dukungan Manajemen dan pelaksana tugas: yaitu kegiatan yang Keluaran (Output) ini dapat dimiliki oleh unit eselon II atau di bawahnya yang melaksanakan fungsi kesekretariatan atau sejenisnya, keluaran output ini bersifat permanen yang masuk, kegiatan ini:

- Monitoring Evaluasi Pelaksanaan Diklat

Kegiatan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan diklat dilaksanakan dalam rangka mengidentifikasi permasalahan dalam penyelenggaraan diklat dan merumuskan penyelesaiannya sebagai bahan perbaikan dan penyempurnaan kualitas pelaksanaan diklat ke depan. Kegiatan ini terdiri dari : Penyusunan laporan bulanan, triwulan, semester, tahunan, LKj, dan penyusunan statistik diklat. Anggaran untuk kegiatan ini dalam pagu tahun 2020 adalah sebesar **Rp127.930.000,-**.

- Akreditasi Kelembagaan Diklat Eksternal dan Internal

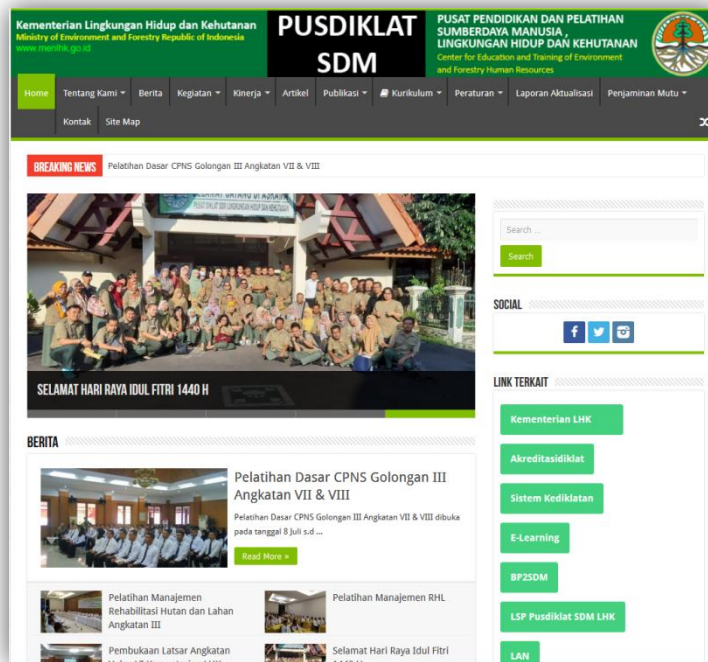
Dalam rangka meningkatkan kemampuan teknis dan manajerial tenaga kediklatan diperlukan kegiatan akreditasi kelembagaan diklat eksternal dan internal. Akreditasi lembaga diklat bertujuan untuk memberikan penjaminan kualitas penyelenggaraan diklat yang dilakukan melalui serangkaian penilaian terhadap unsur lembaga diklat. Lembaga diklat internal adalah seluruh BDLHK sedangkan lembaga diklat Eksternal adalah Pusat Diklat SDM Perhutani. Anggaran untuk membiayai kegiatan ini dalam pagu tahun 2020 adalah sebesar **Rp22.360.000,-**.

- Buku Terbitan/Majalah/Leaflet

Dalam rangka publikasi dan informasi program dan hasil diklat serta sebagai salah satu upaya pengembangan profesi widyaiswara, maka diterbitkan majalah kediklatan dan penerbitan leaflet, majalah dan buku. Majalah dan buku diklat ini didistribusikan kepada pihak-pihak terkait (pengguna diklat), sehingga semua pihak terkait akan memperoleh informasi kediklatan. Anggaran untuk melaksanakan kegiatan ini dalam pagu adalah sebesar **Rp86.845.000,-**.

- Pengelolaan Informasi Kediklatan

Dalam era informasi dan komunikasi yang semakin canggih, maka diklat lingkungan hidup dan kehutanan telah mengembangkan suatu teknologi informasi dan komunikasi dalam rangka memperluas publikasi kediklatan serta akselerasi komunikasi kediklatan di seluruh unit kerja lingkup Pusdiklat SDM LHK melalui website **<http://portal.pusdiklatsdmlhk.id>** untuk operasional pengelolaan dan pengembangan sistem informasi kediklatan/website dialokasikan anggaran dalam pagu sebesar **Rp25.895.000,-**



Gambar 3. Website <http://portal.pusdiklatsdm.lhk.id>

- Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

Penyelenggaraan SPIP dimaksudkan untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa tujuan organisasi dapat dicapai melalui penyelenggaraan kegiatan yang efektif, ekonomis, dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, keamanan pengelolaan aset BMN, serta ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Anggaran untuk melaksanakan kegiatan ini dalam pagu tahun 2020 adalah sebesar **Rp11.875.000,-**.

- **Pendukung Kediklatan**

Pendukung kediklatan adalah komponen dari output SDM Aparatur dan Non Aparatur LHK yang meningkat kapasitasnya, Yaitu kegiatan yang secara langsung mendukung kegiatan penyelenggaraan pelatihan adapun kegiatan tersebut adalah:

- Evaluasi Pasca Diklat

Diklat yang berkualitas adalah yang mampu meningkatkan pengetahuan dan kemampuan peserta sesuai dengan tujuan diklat dan pada gilirannya mampu meningkatkan kinerja para peserta diklat di tempat tugasnya. Kegiatan evaluasi pasca diklat dimaksudkan untuk mengetahui dampak diklat terhadap kinerja para peserta diklat setelah mengikuti proses diklat.

Hasil yang ingin dicapai dari kegiatan ini adalah diperolehnya bahan untuk perbaikan penyelenggaraan diklat ke depan, meliputi materi, metoda, alat bantu pembelajaran, lokasi praktek, dll. Anggaran untuk melaksanakan kegiatan ini dalam pagu adalah sebesar **Rp151.735.000,-**.

- Pengembangan Kerjasama Kediklatan

Kegiatan Pengembangan Kerjasama Kediklatan dilaksanakan dalam rangka pengembangan diklat yang berkelanjutan sehingga perlu dilakukan kerjasama dengan pihak-pihak terkait berupa penyediaan dana, tenaga pengajar/narasumber, moderator, dan pengembangan kurikulum secara terus menerus dan sistemik sehingga diklat dapat memenuhi kebutuhan para pengguna yang setiap saat terus berkembang. Untuk memperoleh dukungan dari berbagai pihak terkait, maka dilaksanakan penyusunan bahan kerjasama, dan kerjasama pengembangan SDM. Anggaran untuk pelaksanaan kegiatan ini dalam pagu sebesar **Rp60.695.000,-**.

Pusat Diklat SDM LHK selain melaksanakan diklat dari anggaran sendiri juga mengadakan kerja sama diklat dengan pihak lain baik dengan Eselon I lainnya, pihak swasta dan antar Kementerian, dimana bentuk kerjasama adalah Pusat Diklat SDM LHK sebagai penyelenggara kegiatan diklat menyediakan fasilitas tempat pembelajaran, panitia pelaksana dan juga tenaga pengajar sedangkan untuk anggaran dan peserta disediakan oleh mitra kerjasama. Kerjasama diklat yang dilaksanakan adalah bidang teknis Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta bidang administrasi. Bidang teknis diklat-diklat yang sering dilaksanakan diantaranya adalah diklat bidang lingkungan hidup dengan Pemerintah Daerah dan Kementerian Lainnya, Diklat tentang Penegakan Hukum dengan Dirjen Gakkum, Diklat Auditor Tenaga Teknis Kehutanan dan Lingkungan Hidup dengan Pihak Swasta dan untuk diklat bidang administrasi adalah Diklat Pengadaan barang dan jasa pemerintah dimana Pusat Diklat SDM LHK sudah mendapatkan akreditasi 'B' dari LKPP. Waktu pelaksanaan kerjasama diklat tersebut tidak terencana tetapi disesuaikan dengan kebutuhan dari mitra sesudah memperhatikan jadwal pelaksanaan kegiatan-kegiatan Pusat Diklat SDM LHK.

- Evaluasi Pelaporan dan Publikasi

Kegiatan evaluasi pelaporan dilaksanakan dalam rangka mendukung kegiatan pelaporan serta pencetakan buku. Adapun anggaran yang disediakan adalah sebesar **Rp119.100.000,-**.

2) Penyelenggaraan Diklat Teknis, yang dijabarkan dalam elemen kegiatan sebagai berikut:

a) Diklat Teknis, komponen kegiatannya yaitu :

Pada elemen kegiatan ini terbagi menjadi dua kegiatan yaitu kegiatan Penyelenggaraan Diklat Aparatur dan Non Aparatur dengan outputya SDM Aparatur dan Non Aparatur yang meningkat kapasitasnya dan komponen kegiatannya adalah Diklat Teknis dan fungsional serta Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan Menengah Kejuruan dengan output Tenaga Teknis menengah kejuruan yang tersedia dan komponen kegiatannya adalah Dokumen Perencanaan dan Pembinaan, dengan rincian sebagai berikut

- Diklat Teknis dan Fungsional

Diklat Teknis dan Fungsional adalah komponen kegiatan pelatihan untuk tenaga teknis dan pejabat fungsional bidang kehutanan dan lingkungan hidup, tetapi untuk elemen kegiatan diklat teknis adalah khusus pelatihan teknis adapun kegiatannya adalah :

- Penyelenggaraan Pelatihan Pendampingan Perhutanan Sosial Paska Izin Jarak Jauh Secara Elektronik (E-learning)

Dengan adanya Pandemi Covid-19 Kepala BP2SDM mengeluarkan edaran melalui Surat Edaran Kepala BP2SDM Nomor SE.1/P2SDM/SET/SET.1/3/2020 tanggal 17 Maret 2020 dimana salah satu pointnya adalah pelaksanaan penyelenggaraan diklat diutamakan menggunakan metode e-learning. Pusat Diklat SDM LHK melakukan revisi dengan mengganti beberapa diklat klasikal menjadi diklat e-learning. Untuk diklat pertama yang dilaksanakan Pusdiklat SDM LHK bekerjasama dengan Dirjen PSKL yaitu untuk melatih para pendamping Perhutanan sosial dengan jumlah peserta sebanyak 3000 orang. Untuk yang dilaksanakan di Pusdiklat sebanyak 480 orang dan di 7 (tujuh) BDLHK masing-masing melaksanakan diklat sebanyak 360 orang. Dirjen PSKL

berperan dalam menyediakan calon peserta dan pemberian fasilitas bagi peserta yaitu uang harian, dan pemberian bantuan kuota data internet. Dalam pelaksanaan di Pusdiklat SDM LHK anggaran yang digunakan sebesar **Rp326.200.000,-**.

- Pelatihan Pengendalian Karhutla Bagi MPA Berkesadaran Hukum Secara Elektronik (E-Learning)

Pelatihan ini dilaksanakan secara E-Learning bagi Masyarakat Peduli Api dengan jumlah peserta sebanyak **86** Orang, dengan jumlah anggaran sebanyak **Rp130.570.000.-**

- Pelatihan Analisis Neraca Air sebagai Dasar Mitigasi Bencana Alam dan Rehabilitasi Lahan Secara Elektronik (E-Learning)

Pelatihan ini dilaksanakan secara E-Learning dengan jumlah peserta sebanyak **198** Orang, dengan jumlah anggaran sebanyak **Rp137.370.000.-**

- Pelatihan Pemetaan Partisipatif Berbasis Digital Bagi Program Perhutanan Sosial Secara Elektronik.

Pelatihan ini dilaksanakan secara E-Learning dengan jumlah peserta sebanyak **180** Orang, dengan jumlah anggaran sebanyak **Rp277.800.000.-**

- Pelatihan Pemetaan Partisipatif bagi program TORA Berbasis Digital Bagi Program Perhutanan Sosial Secara Elektronik.

Pelatihan ini dilaksanakan secara E-Learning dengan jumlah peserta sebanyak **120** Orang, dengan jumlah anggaran sebanyak **Rp102.000.000.-**

- Pelatihan Program Ekonomi Nasional (PEN)

Dalam rangka mendukung program Pemulihan Ekonomi Nasional khususnya di bidang peningkatan ketahanan pangan nasional terpadu serta menunjang kegiatan pendampingan yang dilaksanakan oleh tenaga pendamping, diperlukan peningkatan pengetahuan dan kapasitas tenaga pendamping untuk menjawab berbagai kebutuhan dan permasalahan yang dihadapi petani pemegang ijin perhutanan sosial. Pusat Diklat SDM LHK dalam mendukung Program PEN mengadakan Pelatihan bagi Anggota KTH dan KUPS dengan Rincian sebagai berikut:

1. Pelatihan Agroforestry (Partisipatif Peningkatan Kapasitas KTH dan KUPS dalam Pengelolaan Usaha) secara Blended Learning , Pelatihan ini diikuti oleh **1.983** orang dengan jumlah anggaran **Rp3.994.251.000.-**
2. Pelatihan Bagi Pendamping, Pelatihan ini diikuti oleh **93** orang dengan jumlah anggaran **Rp150.000.000.-**
3. Pelatihan Agroforestry (Pelatihan Peningkatan Kapasitas KTH dan KPS dalam Pengelolaan Usaha) Secara Klasikal On Site Pelatihan ini diikuti oleh **682** orang dengan jumlah anggaran **Rp2.115.749.000.-**

- Pendukung Kediklatan

Pendukung kediklatan adalah komponen dari output SDM Aparatur yang dan Non Aparatur LHK yang meningkat kapasitasnya, Yaitu kegiatan yang secara langsung mendukung kegiatan penyelenggaraan pelatihan adapun kegiatan tersebut adalah:

- Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi Peserta Didik SMK Kehutanan
Sebagai Instansi pembina teknis SMK Kehutanan Pusat Diklat SDM LHK melakukan Fasilitasi sertifikasi kompetensi bagi peserta didik SMK Kehutanan anggaran yang disediakan untuk kegiatan ini sebesar **Rp45.650.000,-**
- Pendukung Kegiatan Lomba Karya Tulis Peserta Didik SMK Kehutanan Negeri Tahun 2020
Pada tahun 2020, Pusat Diklat SDM Lingkungan Hidup dan Kehutanan akan melaksanakan kegiatan Lomba Karya Tulis Peserta Didik SMK Kehutanan Negeri Tahun 2020. Dalam melaksanakan kegiatan ini, terdapat beberapa kebutuhan untuk mendukung kesuksesan pelaksanaan kegiatan tersebut yaitu pencetakan buku, rapat pembahasan, dialog bersama menteri KLHK, dan publikasi. Maka dari itu disusunlah Pendukung Kegiatan Lomba Karya Tulis Peserta Didik SMK Kehutanan Negeri Tahun 2020 dengan anggaran sebesar **Rp70.350.000,-**.
- Pembinaan Teknis SMK Kehutanan dan Penyelenggaraan Diklat Teknis Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
Dalam rangka melakukan pembinaan teknis SMK Kehutanan Pusat Diklat SDM Lingkungan Hidup dan Kehutanan melakukan supervisi, monitoring

dan evaluasi Penyelenggaraan SMK Kehutanan dan rapat-rapat pembinaan SMK Kehutanan dengan instansi terkait, anggaran untuk kegiatan ini sebesar **Rp92.600.000,-** .

- **Penyelenggaraan Pendidikan Menengah Kejuruan Kehutanan (K3)**

Kegiatan penyelenggaraan pendidikan menengah kejuruan kehutanan Pusat Diklat SDM LHK tahun 2020 adalah untuk mencapai sasaran tersedianya tenaga teknis menengah kehutanan yang terampil adapun komponen kegiatannya adalah:

- **Dokumen Perencanaan dan Pembinaan**

Indikator kinerja kegiatan dari kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan Menengah Kejuruan Kehutanana dalah tersedianya tenaga teknis menengah kejuruan kehutanan, sebanyak **466** orang. Pusklat SDM LHK sebagai pembina teknis bagi SMK Kehutanan Negeri dan terdapat di 5 lokasi yaitu SMK Kehutanan Negeri Kadipaten, SMK Kehutanan Negeri Makassar, SMK Kehutanan Negeri Pekanbaru, SMK Kehutanan Negeri Samarinda, dan SMK Kehutanan Negeri Manokwari melakukan pembinaan penyelenggaraan pendidikan SMK Kehutanan, Tenaga Pendidik dan tenaga kependidikan tgdengan output kegiatan berupa Dokumen Perencanaan dan Pembinaan. Pada tahun 2020 akibat Covid-19 terjadi refocusing anggaran untuk kegiatan Perencanaan dan Pembinaan sehingga banyak kegiatan yang tidak dilaksanakan sesuai yang telah direncanakan. Adapun kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2020 adalah: Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi Peserta Didik SMK Kehutanan, Lomba Karya Tulis SMK Kehutanan, Pembinaan Teknis SMK Kehutanan, Peningkatan Kapasitas Guru dan Tenaga Kependidikan (Magang, Studi banding, Pelatihan), dan Penyegaran Penilai Angka Kredit Guru. Anggaran untuk membiayai dalam pagu tahun 2020 adalah sebesar **Rp385.350.000,-**.



Gambar 4. Kegiatan SMK Kehutanan

b) Diklat Fungsional dan Karyasiswa, elemen kegiatannya yaitu:

Pada elemen kegiatan ini terbagi menjadi dua output yaitu output SDM Aparatur dan Non Aparatur yang meningkat kapasitasnya dengan komponen kegiatan nya adalah Diklat Teknis dan fungsional serta output SDM LHK yang Lulus Pendidikan Karyasiswa, dengan rincian sebagai berikut

- **Diklat Teknis dan Fungsional**

Pada elemen kegiatan ini adalah khusus untuk penyelenggaraan diklat fungsional. Untuk mencapai terselenggaranya diklat fungsional bagi pejabat/calon pejabat fungsional pada lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, ditetapkan kebijakan meningkatkan penyelenggaraan diklat fungsional dalam rangka mengembangkan profesi tenaga fungsional pada lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Diklat fungsional bertujuan untuk memenuhi kompetensi yang sesuai dengan jenjang jabatan fungsional dan juga sebagai persyaratan untuk kenaikan tingkat/jenjang dari jabatan fungsional tersebut. Pelaksanaan kegiatan-kegiatan tersebut akan dilakukan melalui Penyelenggaraan Diklat Fungsional Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Pada Tahun 2020 dengan Adanya Pandemi Covid-19 sehingga menyebabkan adanya Refocusing Anggaran ada beberapa kegiatan pelatihan yang belum terlaksana menjadi tidak dilaksanakan tetapi ada juga yang dirubah metodenya dari klasikal menjadi

full e-learning. Komponen kegiatan dalam Diklat Fungsional yang akan dilaksanakan adalah :

- Pelatihan bagi Pejabat Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan (PEH)

Diklat Fungsional PEH yang dilaksanakan adalah :

- a. Pelatihan PEH Jenjang Madya jarak jauh dengan elektronik (e-learning) direncanakan akan diikuti oleh **64** orang peserta. Anggaran biaya yang disediakan dalam pagu 2020 adalah sebesar **Rp150.680.000,-**.
- b. Pelatihan Pembentukan PEH Tk. Ahli Angk.I dan Angk.II dilaksanakan secara klasikal karena sebelum adanya Pandemi Covid-19 yang diikuti oleh **76** orang dengan anggaran yang digunakan adalah sebesar **Rp557.915.000**
- c. Pelatihan Pembentukan PEH Tk. Ahli Angk. III, IV dan V jarak jauh dengan elektronik (e-learning) direncanakan akan diikuti oleh **112** orang dengan anggaran dalam pagu 2020 adalah sebesar **Rp314.920.000,-**

- Pelatihan bagi Pejabat Fungsional Polisi Hutan (Polhut)

Diklat Fungsional Polhut yang dilaksanakan adalah Pelatihan Pembentukan Polhut Tingkat Ahli, diklat ini tidak jadi dilaksanakan karena adanya Refocusing Anggaran akibat pandemi Covid-19 tetapi pelaksanaannya sudah dalam tahap persiapan, direncanakan jumlah peserta sebanyak **69** orang dan anggaran yang telah digunakan dalam tahap persiapan adalah sebesar **Rp12.235.000,-**.



Gambar 5. Pelatihan Pembentukan Polhut Fase II

- Pelatihan bagi Pejabat Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan

Diklat Fungsional Pedal yang dilaksanakan adalah : Pelatihan jabatan fungsional Pengendali Dampak Lingkungan, kegiatan ini diadakan sebelum adanya Pandemi Covid-19 sehingga dilaksanakan secara klasikal dengan jumlah peserta sebanyak **60** orang dan anggaran yang digunakan adalah sebesar **Rp188.739.000,-**.



Gambar 6. Kegiatan Pembukaan Pelatihan Pembentukan Fungsional

- Pelatihan bagi Pejabat Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan Jarak Jauh Dengan Elektronik (E-Learning)

Adanya kebutuhan pelatihan jabatan fungsional pengendali dampak lingkungan di masa pandemi mengharuskan pelatihan dilaksanakan secara jarak jauh (E-Learning) dengan jumlah peserta sebanyak 40 orang dan anggaran yang digunakan adalah sebesar **Rp74.000.000,-**

- **Pendukung Kediklatan**

Pendukung kediklatan adalah komponen dari output SDM Aparatur dan Non Aparatur LHK yang meningkat kapasitasnya, Yaitu kegiatan yang secara langsung mendukung kegiatan penyelenggaraan pelatihan adapun kegiatan tersebut adalah:

- Rakor Diklat Fungsional

Kegiatan ini merupakan rapat koordinasi sinkronisasi data dengan seluruh Eselon I Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang menangani pelatihan fungsional terkait kebutuhan pelatihan fungsional

untuk tahun 2021. Anggaran yang disediakan untuk kegiatan ini adalah sebesar **Rp8.020.000,-**.

- **SDM LHK yang lulus pendidikan karyasiswa**

Pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan yang semakin kompleks permasalahannya, perlu dukungan SDM yang profesional sebagai faktor utama keberhasilan pembangunan. SDM yang diperlukan adalah yang menguasai dan mampu memanfaatkan serta mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta mempunyai kemampuan manajemen yang baik dalam pengurusan lingkungan hidup dan kehutanan.

Untuk mencapai hal di atas ditetapkan kebijakan meningkatkan pengelolaan pendidikan program pasca sarjana bagi aparatur Lingkungan Hidup dan kehutanan di perguruan tinggi. Namun dengan adanya Pandemi Covid-19 sehingga mengakibatkan adanya Refocusing Anggaran terjadi penurunan target output dari target awal sebelumnya. Adapun kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan adalah:

- Pendidikan Magister (S-2)

Pendidikan Pasca Sarjana S-2 bagi pegawai Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang dibiayai dari anggaran Pusdiklat SDM LHK seluruhnya untuk pendidikan di dalam negeri. Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan kemampuan pegawai Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan berkualifikasi pendidikan S-.Pendidikan program S-2 target lulusan tahun 2020 sebanyak **20** orang. Anggaran untuk kegiatan ini dalam pagu tahun 2020 sebesar **Rp2.094.330.000,-**

- Pendidikan Doktor (S-3)

Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan kemampuan pegawai lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan kualifikasi pendidikan S-3. Pendidikan Doktor (S-3) target lulusan tahun 2020 sebanyak **3** orang. Anggaran kegiatan ini dialokasikan dalam pagu tahun 2020 sebesar **Rp488.601.000,-**

- Pengelolaan Pendidikan Lanjutan

Selain kegiatan akademis dan operasional karyasiswa sebagaimana di atas, dalam mendukung pendidikan Pasca Sarjana terdapat kegiatan

administrasi pengelolaan pendidikan pasca sarjana yang terdiri dari tes dan pendaftaran program pasca sarjana, presentasi lulusan karyasiswa, komisi pertimbangan pasca sarjana, monitoring dan evaluasi, dan lain-lain. Kegiatan ini juga diperuntukan bagi karyasiswa yang dibiayai oleh sponsor/donor/bantuan lembaga/instansi di dalam dan luar negeri.. Melalui kegiatan ini diharapkan dapat terkelolanya pendidikan pasca sarjana (S2 dan S3) bagi aparatur Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Pada tahun 2020 dialokasikan anggaran untuk kegiatan ini dalam pagu sebesar **Rp289.509.000,-**.



Gambar 7. Kegiatan Presentasi Hasil Studi Karyasiswa Program Doktor (S3)

3) Penyelenggaraan Diklat Kepemimpinan dan Administrasi, dijabarkan dalam elemen kegiatan sebagai berikut:

a) Diklat Kepemimpinan, komponen kegiatan yaitu:

Pada elemen kegiatan ini merupakan output kegiatannya adalah SDM Aparatur dan Non Aparatur yang meningkat kapasitasnya dan terbagi menjadi dua komponen yaitu diklat kepemimpinan dan pendukung kediklatan

- **Diklat Kepemimpinan**

Pada tahun 2020 setelah adanya refocusing anggaran komponen kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut :

- Pelatihan Kepemimpinan Tingkat II

Pelatihan Kepemimpinan Tingkat II diikuti oleh PNS Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang akan dan atau telah menduduki jabatan struktural Eselon II. Pada tahun 2020 direncanakan **6 orang** pegawai Kementerian

Lingkungan Hidup dan Kehutanan akan mengikuti Pelatihan Kepemimpinan Tingkat II di LAN dan Badan Diklat Provinsi yang menyelenggarakan Diklat PIM II. Anggaran yang dialokasikan untuk biaya mengikuti Pelatihan Kepemimpinan per orang sebesar Rp30.261.000,- sedangkan selebihnya adalah untuk koordinasi, konsultasi penyelenggaraan dengan LAN Pusat dan daerah serta instansi terkait sebesar Rp19.500.000,- sehingga total anggaran untuk Pelatihan Kepemimpinan Tingkat II dalam pagu tahun 2020 sebesar **Rp201.066.000,-**. Hasil kegiatan ini adalah tersedianya pegawai Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang telah memiliki kompetensi/kemampuan kepemimpinan jenjang jabatan eselon II.

- **Pendukung Kediklatan**

Pendukung kediklatan adalah komponen dari output SDM Aparatur yang dan Non Aparatur LHK yang meningkat kapasitasnya, Yaitu kegiatan yang secara langsung mendukung kegiatan penyelenggaraan pelatihan adapun kegiatan tersebut adalah:

- Workshop Penyelenggaraan Pelatihan Kepemimpinan Administrator dan Pengawas

Workshop ini direncanakan diikuti oleh 30 orang widyaiswara yang berasal dari Pusat Diklat SDM LHK dan Balai Diklat LHK, Adapun tujuan kegiatan ini adalah sebagai berikut:

- a. Menambah wawasan dan keterampilan widyaiswara terkait substansi penyelenggaraan PKA dan PKP;
- b. Mengidentifikasi permasalahan/kendala dalam pencapaian tujuan PKA dan PKP;
- c. Merumuskan solusi alternatif dari permasalahan/kendala dalam pencapaian tujuan PKA dan PKP.

Anggaran yang disediakan adalah sebesar **Rp68.850.000**

- Seminar Inovasi Diklat Kepemimpinan

Atas dasar banyaknya inovasi yang telah dilakukan oleh Pejabat Eselon III dan IV di lingkup Kementerian LHK yang telah mengikuti Pelatihan Kepemimpinan, maka disusunlah kegiatan ini dengan tujuan :

- a. Sebagai wadah untuk saling berbagi informasi, terkait pengalaman, kendala-kendala dalam berinovasi;
- b. Menambah wawasan bagi peserta;
- c. Mengidentifikasi kebutuhan inovasi di sektor publik;
- d. Memberikan apresiasi kepada inovator.

Anggaran yang disediakan untuk kegiatan ini adalah sebesar **Rp58.170.000,-**

b) Diklat Administrasi, elemen kegiatannya adalah sebagai berikut:

Pada elemen kegiatan ini merupakan output kegiatannya adalah SDM Aparatur dan Non Aparatur yang meningkat kapasitasnya dan terbagi menjadi dua komponen yaitu diklat Administrasi dan pendukung kediklatan

- **Diklat Administrasi**

Pada tahun 2020 setelah adanya refocusing anggaran komponen kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut :

- Pelatihan Training Officer Course (TOC) Sub Admin Pelatihan jarak jauh secara elektronik (Pelaksanaan Pelatihan dengan Metode E-larning)

Pelatihan Training Officer Course Sub Admin adalah Pelatihan untuk penyelenggara pelatihan. Penyelenggara diklat dilatih memahami konsep dasar system diklat e-learning. Memahami konsep dasar tersebut akan meningkatkan Kompetensi penyelenggara diklat e-learning. Selain itu TOC juga merupakan bagian dari persyaratan akreditasi diklat. Kegiatan ini direncanakan diikuti oleh **128 Orang** peserta dengan biaya sebesar **Rp36.335.000,-**

- Pelatihan Kewidyaiswaraan berjenjang Tingkat Tinggi

Salah satu unsur utama dalam penyelenggaraan Pelatihan adalah Widyaiswara yang menjadi unjuk tombak pelatihan yang sesuai dengan tugas mendidik, mengajar dan membimbing PNS serta evaluasi umum. Widyaiswara akan langsung berinteraksi dengan peserta pelatihan melalui transfer audiensi dan kreasi, motivasi, fasilitasi, diskusi. Untuk itu profesionalisme widyaiswara menjadi salah satu prasyarat yang harus dipenuhi. Salah satu syarat untuk naik jenjang menjadi widyaiswara utama adalah dengan mengikuti Pelatihan Kewidyaiswaraan berjenjang Tingkat Tinggi. Target peserta untuk diklat ini adalah **30 Orang**, dengan jumlah anggaran **Rp187.980.000,-**

- Pelatihan Training Of Trainer Substansi

Pelatihan Training of Trainer Substansi adalah Pelatihan untuk Pelatih dilakukan secara e-learning. Definisi secara luasnya adalah pelatihan yang diperuntukkan bagi orang yang diharapkan bagi para calon pengajar/pelatih setelah selesai pelatihan mampu menjadi pelatih dan mampu mengajarkan materi pelatihan tersebut kepada orang lain. Kegiatan ini direncanakan diikuti oleh **371 Orang** peserta dengan biaya sebesar **Rp215.850.000,-**

- Pelatihan Strategi Komunikasi Untuk Promosi dan Pemasaran Jasa Lingkungan Wisata Alam di Kawasan Konservasi

Komunikasi merupakan faktor dalam menunjang kinerja dan citra lembaga. Seiring perkembangan teknologi dan media sosial, lembaga harus mampu memanfaatkannya tidak terkecuali Promosi Pemasaran Jasa Lingkungan Wisata Alam. Pelatihan ini direncanakan diikuti oleh **40 Orang** peserta dengan biaya sebesar **Rp30.700.000,-**

- **Pendukung Kediklatan**

Pendukung kediklatan adalah komponen dari output SDM Aparatur dan Non Aparatur LHK yang meningkat kapasitasnya, Yaitu kegiatan yang secara langsung mendukung kegiatan penyelenggaraan pelatihan adapun kegiatan tersebut adalah:

- Penyusunan Pedoman Evaluasi Penilaian Latsar CPNS

Kegiatan Penyusunan Pedoman Evaluasi Penilaian Latsar CPNS adalah untuk menunjang pelaksanaan Pelatihan Dasar CPNS dimana dalam pelaksanaan pelatihan Latsar CPNS perlu ada Pedoman Evaluasi Penilaian Latsar CPNS Anggaran yang disediakan adalah sebesar **Rp38.150.000,-**

- Koordinasi Penyelenggaraan Diklat

Kegiatan ini dilaksanakan adalah untuk melakukan koordinasi terkait pelatihan yang dilaksanakan Pusat Diklat SDM LHK, BDLHK maupun Instansi lainnya yang melakukan kerjasama dengan Pusat Diklat SDM LHK anggaran yang disediakan adalah sebesar **Rp53.949.000,-**

4) Layanan Program dan Umum, dijabarkan dalam elemen kegiatan sebagai berikut:

a) Program, elemen kegiatannya adalah sebagai berikut :

Pada elemen kegiatan program terbagi menjadi dua komponen kegiatan yaitu:

- Dukungan manajemen dan pelaksana tugas.

Dukungan Manajemen dan pelaksana tugas: yaitu kegiatan yang Keluaran (Output) ini dapat dimiliki oleh unit eselon II atau di bawahnya yang melaksanakan fungsi kesekretariatan atau sejenisnya, keluaran output ini bersifat permanen yang masuk kegiatan ini adalah komponen:

- Pembuatan Renja, Renstra dan Monitoring IKK

Rencana Kerja (Renja) dibuat setiap tahun yang merupakan ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan menyeluruh mengenai perencanaan kegiatan sesuai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Rencana kerja wajib disusun oleh suatu instansi/lembaga sebagai acuan dalam melaksanakan kegiatan dalam 1 (satu) tahun. Pada tahun 2020 disusun juga Rencana Strategis (Renstra) 2020-2024 sebagai dokumen perencanaan kegiatan 5 (lima) tahun kedepan Pusdiklat SDM LHK yang memuat target capaian IKK. Monitoring IKK perlu dilaksanakan guna memonitor perkembangan pencapaian IKK. Anggaran untuk membiayai kegiatan ini adalah sebesar **Rp 75.615.000,-**.

- Perencanaan, Penyusunan dan Revisi Anggaran

Dalam rangka pelaksanaan anggaran, perlu disusun dokumen perencanaan yaitu Perencanaan dan Penyusunan Program Anggaran (RKAKL/DIPA). Kegiatan penyusunan dokumen perencanaan ini untuk menjadi acuan dan pedoman dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Pusat Diklat SDM Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Kegiatan perencanaan dan penyusunan program anggaran ini terdiri dari kegiatan konsultasi/koordinasi anggaran, menghadiri rapat-rapat terkait anggaran, pelaksanaan revisi anggaran tahun 2020 di tingkat Kanwil DJPB Provinsi Jawa Barat dan revisi tingkat DJA serta penyusunan anggaran tahun 2021. Anggaran untuk membiayai kegiatan ini dalam pagu tahun 2020 adalah sebesar **Rp131.661.000,-**.

- Pemeliharaan dan Penerapan ISO 9001:2015

Penerapan kegiatan sistem manajemen mutu ISO 9001:2015 dimaksudkan agar Pusdiklat SDM LHK dapat menyelenggarakan diklat dengan lebih baik, melalui

prinsip : komitmen manajemen, perbaikan terus menerus dan kepuasan pelanggan. Alokasi anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar **Rp33.543.000,-**.



Gambar 8. Kegiatan audit ISO 9001 : 2015 oleh PT. IMS International
(Integrated Management Services) International

- **Pendukung Kediklatan**

Pendukung kediklatan adalah komponen dari output SDM Aparatur dan Non Aparatur LHK yang meningkat kapasitasnya, Yaitu kegiatan yang secara langsung mendukung kegiatan penyelenggaraan pelatihan adapun kegiatan tersebut adalah:

- **Pemeliharaan dan Penerapan ISO 9001:2015**

Penerapan kegiatan sistem manajemen mutu ISO 9001:2015 dimaksudkan agar Pusdiklat SDM LHK dapat menyelenggarakan diklat dengan lebih baik, melalui prinsip : komitmen manajemen, perbaikan terus menerus dan kepuasan pelanggan. Kegiatan yang dilakukan adalah pendampingan pemeliharaan dan penerapan ISO 9001;2015 alokasi anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar **Rp20.000.000,-**.

b) Kepegawaian, komponen kegiatannya yaitu :

Pada elemen kegiatan ini terbagi menjadi dua kegiatan yaitu kegiatan dukungan manajemen dan pelaksana tugas serta kegiatan Penyelenggaran Diklat Aparatur dan Non Aparatur dengan output SDM Aparatur dan Non Aparatur LHK yang meningkat kapasitasnya komponennya pendukung kediklatan, dengan rincian sebagai berikut:

- Dukungan Manajemen dan pelaksana tugas: yaitu kegiatan yang Keluaran (Output) ini dapat dimiliki oleh unit eselon II atau di bawahnya yang melaksanakan fungsi

keseekretariatan atau sejenisnya, keluaran output ini bersifat permanen yang masuk, kegiatan ini:

- **Kepegawaian**

Dalam rangka menunjang administrasi kepegawaian dan pengembangan karir Aparatur Sipil Negara Pusat Diklat SDM LHK diperlukan anggaran untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut : Penyusunan mutasi/administrasi kepegawaian (formasi, kenaikan pangkat, jabatan, laporan-laporan kepegawaian Triwulan 1, 2, 3, dan 4 semester 1, 2 dan tahunan), pembelian ATK, pembinaan/supervisi/ koordinasi pendidikan dan kediklatan serta mengikuti rapat-rapat/konsultasi. Anggaran yang disediakan dalam pagu tahun 2020 untuk kegiatan-kegiatan tersebut adalah sebesar **Rp57.480.000,-**.

- **Kewidyaiswaraan**

Salah satu faktor untuk menjadi lembaga diklat yang berkualitas adalah tersedianya Widyaiswara yang kompeten dalam meng ampu mata diklat. Untuk itu perlu ditunjang dengan pelayanan keseekretariatan Widyaiswara serta pengembangan profesi. Kebutuhan Keseekretariatan widyaiswara antara lain adalah pembelian ATK dan bahan operasional komputer, fotocopy, biaya rapat-rapat, sedangkan untuk pengembangan profesi antara lain penelaahan DUPAK, penyusunan tabulasi angka kredit jabatan fungsional widyaiswara, penelitian kediklatan dll. Anggaran untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan tersebut adalah sebesar **Rp166.676.000,-**.

- **Peningkatan Kompetensi Pegawai**

Kompetensi dan pengetahuan pegawai Pusat Diklat SDM LHK harus selalu ditingkatkan kualitasnya sebagai upaya untuk peningkatan pelayanan. Kegiatan yang dilakukan dalam upaya meningkatkan kompetensi dan kemampuan pegawai adalah dengan mengirimkan pegawai untuk mengikuti diklat, seminar, lokakarya, workshop, sosialisasi, dan seleksi widyaiswara. Anggaran untuk melaksanakan kegiatan tersebut dalam pagu APBN tahun 2020 adalah sebesar **Rp35.000.000,-**.

- **Pendukung Kediklatan**

Pendukung kediklatan adalah komponen dari output SDM Aparatur dan Non Aparatur LHK yang meningkat kapasitasnya, Yaitu kegiatan yang secara langsung mendukung kegiatan penyelenggaraan pelatihan adapun kegiatan tersebut adalah:

- Koordinasi/Konsultasi/Pembinaan Teknis Penyelenggaraan Diklat/Kerjasama Diklat

Dalam rangka koordinasi dan konsultasi pelaksanaan kediklatan, pengembangan kerja sama kediklatan, dan juga melaksanakan fungsi sebagai Pembina teknis kediklatan, serta pengelolaan KHDTK kepada BDLHK bagi pimpinan pada tahun 2020 telah disediakan anggaran sebesar **Rp424.779.000,-**.

- Peningkatan Kapasitas Tenaga Kediklatan

Kegiatan ini bertujuan untuk memfasilitasi pegawai terutama pengampu pelatihan dalam meningkatkan kapasitasnya seperti pembiayaan penelitian hingga penerbitan jurnal. Adapun kegiatan tersebut dianggarkan sebesar **Rp28.000.000,-**

c) Umum, komponen kegiatannya yaitu :

Pada elemen kegiatan ini terbagi menjadi dua kegiatan yaitu kegiatan dukungan manajemen dan pelaksana tugas serta kegiatan Penyelenggaran Diklat Aparatur dan Non Aparatur dengan output SDM Aparatur dan Non Aparatur LHK yang meningkat kapasitasnya komponennya pendukung kediklatan, dengan rincian sebagai berikut:

- Dukungan Manajemen dan pelaksana tugas: yaitu kegiatan yang Keluaran (Output) ini dapat dimiliki oleh unit eselon II atau di bawahnya yang melaksanakan fungsi kesekretariatan atau sejenisnya, keluaran output ini bersifat permanen yang masuk, kegiatan ini:

- Ketatausahaan/BMN/Keuangan

Dalam rangka meningkatkan pelayanan pelaksanaan kediklatan dan operasional perkantoran diperlukan anggaran untuk membiayai kegiatan Ketatausahaan/BMN/Keuangan. Kegiatan tersebut digunakan untuk operasional perpustakaan, rapat-rapat pembahasan serta koordinasi/konsultasi ketatausahaan/BMN/Keuangan. Anggaran yang disediakan untuk membiayai kegiatan tersebut adalah sebesar **Rp108.100.000,-**.

- Layanan Sarana dan Prasarana Internal

- Pembangunan/Renovasi gedung dan bangunan

Dalam rangka meningkatkan fasilitas sarana prasarana Pusdiklat SDM LHK pada Tahun 2020 dianggarkan kegiatan Renovasi Gedung kantor dan perpustakaan serta Renovasi ruang transit Kapusdiklat SDM LHK DI Blok IV Lt. 7 Gedung Manggala Wanabakti.. Pada Tahun 2020, terjadi bencana pandemic Corona virus Disease-2019 (COVID-19) yang melanda dunia dan juga Indonesia yang membawa resiko bagi Kesehatan dan menimbulkan korban jiwa. Adanya situasi tersebut Pusat Diklat SDM Lingkungan Hidup dan Kehutanan melakukan penyesuaian kegiatan dimana banyak kegiatan yang mengalami penghematan adapun kegiatan yang mengalami penghematan diantaranya adalah Renovasi Gedung Perkantoran dan Asrama untuk kegiatan Pengawasan dan Fisik sedangkan Perencanaan dan Pengelolaan sudah dilaksanakan, serta kegiatan yang sudah selesai dilaksanakan adalah Renovasi Ruang Transit Kapusdiklat Blok IV Lt.7 Gedung Manggala Wanabakti. Anggaran yang disediakan untuk membiayai kegiatan tersebut adalah sebesar **Rp200.000.000,-**.

- Pengadaan perangkat pengolah data dan informasi

Di masa pandemic Covid-19 dimana sebagian besar kegiatan kediklatan dan rapat-rapat dilakukan secara *online*. Kondisi seperti ini diperlukan fasilitas penunjang salah satunya adalah laptop. Menurut catatn BMN, Pusdiklat SDM LHK pada saat ini mempunyai 43 unit laptop, dengan kondisi rusak berat sebanyak 24 unit dan dalam kondisi baik sebanyak 19 unit. Pengadaan ini bertujuan untuk menggantikan laptop yang dalam kondisi rusak berat pada daftar inventarisasi BMN. Anggaran yang disediakan untuk membiayai kegiatan tersebut adalah sebesar **Rp425.000.000,-**.

- Pembayaran gaji dan tunjangan (gaji, TPPK)

Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka memenuhi hak-hak dari 107 orang pegawai PNS atas pelaksanaan tugas-tugasnya. Anggaran untuk membiayai kegiatan ini dalam pagu tahun 2020 adalah sebesar **Rp14.612.079.000,-**.

- Operasional Perkantoran

Kegiatan ini adalah untuk mendukung kegiatan layanan perkantoran (langganan koran dan majalah, biaya operasional asrama, gaji petugas pramu bakti/teknisi/satpam, pengemudi, honor pengelola kegiatan, langganan internet, fotocopy, Fotocopy penggandaan dan penjilidan, biaya rapat-rapat, jasa pos dan giro, keperluan sehari-hari perkantoran, langganan listrik, langganan telepon, air dan gas pengadaan masker non-medis (kain) bagi karyawan, pengadaan Hand Sanitizer, langganan aplikasi teleconference). Anggaran untuk membiayai kegiatan ini dalam pagu tahun 2020 adalah sebesar **Rp3.338.552.000,-**.

- Honor Pengelola Keuangan

Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka memberikan hak dari pengelola anggaran antara lain adalah Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pengelola Uang Persediaan, Pengelola SAI dan BMN, Pengelola PNPB, Pejabat Pengadaan Barang/Jasa, Pengurus/Penyimpan BMN Tingkat Kuasa Pengguna Barang. Anggaran dalam kegiatan ini adalah sebesar **Rp278.980.000,-**.

- Perawatan Sarana Perkantoran

Kegiatan ini terkait dengan biaya operasional dan perbaikan peralatan kantor berupa AC Split, Pompa air, Mesin potong rumput, Personal Computer, Peralatan meubeler, Peralatan Fitness, Pemeliharaan Printer, Pemeliharaan LCD Projector, Peralatan Karaoke, Genset, Pemeliharaan Inventaris kantor, sehingga perangkat kerja dimaksud dapat berfungsi dan layak digunakan. Alokasi anggaran untuk kegiatan ini dalam pagu adalah sebesar **Rp199.618.000,-**.



Gambar 9. Sarana Olahraga Indoor dan Outdoor Pusat Diklat SDM LHK

- Perawatan Kendaraan

Kendaraan merupakan salah satu unit pendukung pelaksanaan kegiatan organisasi yang sangat diperlukan keberadaannya. Oleh karenanya agar dapat tetap berfungsi dengan optimal perlu dilakukan pemeliharaan dengan kegiatan berupa perbaikan, rehabilitasi, pembayaran pajak kendaraan bermotor, dan penyediaan bahan bakar. Perawatan meliputi: kendaraan pejabat Eselon II, kendaraan operasional roda-4, pemeliharaan kendaraan operasional roda-2, biaya pemeliharaan dan operasional Kendaraan Roda 6 serta biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan operasional lapangan (double gardan). Alokasi anggaran untuk kegiatan ini dalam pagu adalah sebesar **Rp530.330.000,-**.



Gambar 11. Kendaraan Bermotor Inventaris Pusat Diklat SDM LHK

- Perawatan Gedung

Kegiatan ini terkait dengan biaya perawatan gedung agar dapat berfungsi secara optimal sesuai dengan fungsinya yang terdiri dari : pemeliharaan gedung/ bangunan kantor bertingkat, pemeliharaan jaringan listrik, telepon, PAM dan gas, pemeliharaan jaringan LAN dan Internet. Alokasi anggaran untuk kegiatan ini dalam pagu adalah sebesar **Rp1.701.544.000,-**.



Gambar 12. Ruang Serbaguna dan Ruang Makan Asrama Pusat Diklat SDM LHK

- Pengadaan Peralatan Asrama dan Dapur

Salah satu sarana penunjang kegiatan diklat adalah kenyamanan bagi peserta diklat sehingga para peserta diklat dapat melaksanakan diklat dengan baik. Salah satu upaya tersebut adalah berupa pengadaan sprei, bed cover dan peralatan dapur dan asrama. Anggaran kegiatan ini adalah sebesar **Rp44.875.000,-**.



Gambar 13. Kondisi Asrama dan Dapur Pusat Diklat SDM LHK

- Penambah Daya Tahan Tubuh

Dalam masa darurat nasional akibat Pandemi COVID-19 semua PNS dan PPNNP mendapat penambah daya tahan tubuh untuk menambah imun tubuh dalam menjalankan rutinitas pekerjaan bentuknya adalah madu, susu dan suplemen makanan lain seperti vitamin. Alokasi anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar **Rp 52.022.000,-**.

- **Pendukung Kediklatan**

Pendukung kediklatan adalah komponen dari output SDM Aparatur yang dan Non Aparatur LHK yang meningkat kapasitasnya, Yaitu kegiatan yang secara langsung mendukung kegiatan penyelenggaraan pelatihan adapun kegiatan tersebut adalah:

- **Kegiatan Pendukung Kediklatan dalam Masa Darurat Covid-19**

Pemerintah telah menetapkan status darurat nasional akibat Pandemi Covid-19, dalam masa darurat tersebut Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi segera mengeluarkan Surat Edaran Nomor 19 tahun 2020 tentang penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Lingkungan Instansi Pemerintah dan ditindaklanjuti oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan mengeluarkan Surat Edaran Nomor SE.1/MENLHK/SETJEN/SET.1/3/2020 Tentang Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dimana salah satu kebijakannya adalah adanya pengaturan kerja bagi ASN dimana sebagian bisa bekerja dari rumah (*Work From Home*) dan sebagian ASN yang piket kerja secara bergiliran dengan tetap melaksanakan kerja dari kantor (*Work From Office*) dengan tetap menjalankan protokol kesehatan. Selain itu memperhatikan Surat Edaran Menteri Keuangan No. S-308/PB/2020 Tentang Penegasan Biaya/Belanja Yang Dapat Dibebankan Pada DIPA Satker Dalam Masa Darurat COVID-19 dijelaskan bahwa untuk ASN yang melaksanakan pekerjaan dari kantor (WFO) bisa diberikan bantuan transport dan juga uang makan sesuai standar biaya masukan tahun 2020.

Dengan adanya kebijakan tersebut Pusat Diklat SDM LHK telah mengalokasikan bantuan transport dan uang makan bagi ASN yang melakukan WFO sebesar **Rp305.225.000,-**.

- **Rumah Tangga, Perlengkapan dan Ketatausahaan Penunjang Kediklatan**

Dalam pelaksanaan kegiatan kediklatan diperlukan dukungan sarana dan prasarana penunjang diklat. Adapun kegiatan tersebut adalah kegiatan rutin, biaya pemeliharaan sarana dan prasarana serta belanja operasional dengan anggaran sebesar **Rp962.650.000,-**

PENUTUP

Rencana Kerja Tahunan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Pusat Diklat SDM LHK ini merupakan dokumen rencana resmi yang dipersyaratkan untuk mengarahkan program dan kegiatan Pusdiklat SDM LHK pada tahun 2020 dalam rangka mewujudkan visi dan misi Pembangunan Nasional tahun 2020-2024.

Sebagai dokumen rencana resmi, diharapkan Rencana Kerja Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Pusat Diklat SDM LHK Tahun 2020 ini dapat dipedomani dan direalisasikan oleh pelaksana program/kegiatan, dengan tetap memperhatikan prinsip efektifitas, akuntabilitas dan efisiensi kinerja, baik dari segi fisik maupun penganggarnya.

Rencana Kerja Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Pusat Diklat SDM LHK Tahun 2020, didalam implementasinya perlu dilengkapi dengan dokumen turunan ataupun dokumen pelengkap (Petunjuk Operasional, Kerangka Acuan Kerja dan lain- lain) agar lebih mudah dalam implementasi dan pengoperasionalannya serta lebih memudahkan dalam pengendalian dan evaluasi pencapaian target dan kinerja yang telah ditetapkan, sekaligus untuk menjaga konsistensi dan keberlanjutannya.

Selanjutnya, dalam rangka mewujudkan kegiatan yang berhasil dan berdaya guna, maka diperlukan adanya kerja keras yang terarah, terkoordinasi dengan baik antara semua pihak yang terkait baik internal maupun eksternal.

LAMPIRAN

No.	Program/Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target	Alokasi (Juta Rupiah)	Prioritas Nasional	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Lokasi
1.	Penyelenggaraan Diklat Aparatur dan Non Aparatur LHK				40.083.962.000				
		Meningkatnya kapasitas SDM LHK							
			a. SDM aparatur LHK yang meningkat kapasitasnya	9.617 orang		Non Prioritas	Peneguhan jati diri dan karakter bangsa	Pendidikan berbasis karakter	Pusat Diklat SDM LHK : 4.838 orang dan 7 (tujuh) Balai Diklat LHK : 4.779 orang (BDLHK Pekanbaru : 690 orang, BDLHK Bogor : 660 orang, BDLHK Makassar : 789 orang, BDLHK Samarinda : 660 orang, BDLHK Kupang : 660 orang, BDLHK Pematangsiantar : 660 orang, BDLHK Kadipaten : 660 orang)
			b. LHK yang lulus pendidikan karya siswa (S2 & S3)	23 orang		Non Prioritas	Non Prioritas	Non Prioritas	Pusat Diklat SDM LHK
			c. Nilai KHDTK yang dikelola	66.5 poin		Non Prioritas	Non Prioritas	Non Prioritas	- KHDTK Bukit Suligi, Riau - KHDTK Sawala, Majalengka (Jawa Barat) - KHDTK Loa Haur, Samarinda - KHDTK Tabo-tabo, Makassar - KHDTK Sisimenisanam, Kupang - KHDTK Rumpin, Bogor - KHDTK Pondok Buluh, Pematangsiantar (Sumatera Utara)

No.	Program/Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target	Alokasi (Juta Rupiah)	Prioritas Nasional	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Lokasi
2.	Penyelenggaraan Pendidikan Menengah Kejuruan Kehutanan				385.350.000				
		Tersedianya tenaga teknis menengah kehutanan							
			Jumlah tenaga teknis menengah kejuruan kehutanan	466 orang		Prioritas Nasional	Peneguhan jati diri dan karakter bangsa	Lingkungan satuan pendidikan yang bersih, sehat, ramah dan bebas kekerasan	SMKKN Kadipaten : 96 orang SMKKN Pekanbaru : 104 orang SMKKN Makassar : 94 orang SMKKN Samarinda : 102 orang SMKKN Manokwari : 70 orang

Unit Kegiatan	Indikator Unit Kegiatan	Penanggung Jawab Kegiatan	Satuan	Kegiatan			Keterangan		
				Indikator Kinerja		Rencana Tingkat Capaian (Target)			
1	2	3	4	5		6	7		
Perencanaan, Evaluasi dan Pengembangan E-Learning (UK1)									
Perencanaan dan Pengembangan E-Learning (EK1)									
Nilai KHDTK yang dikelola	A	Pengelolaan KHDTK	Sub Bidang Perencanaan dan Pengembangan E-Learning	Rp	Masukan	:	- Dana	100.000.000	
				Orang		:	- SDM	10	
				Laporan	Keluaran	:	Nilai KHDTK yang dikelola	1	
				Laporan	Hasil	:	Meningkatkan pengelolaan kawasan hutan diklat oleh BDLHK	1	
	-	Manfaat		:	Hutan diklat dapat dimanfaatkan secara optimal	-			
	B	Penyusunan Modul dan Video		Rp	Masukan	:	- Dana	350.000.000	
				Orang		:	- SDM	10	
				Laporan	Keluaran	:	Laporan penyusunan modul dan video	1	
Laporan			Hasil	:	Tersedianya modul dan video untuk diklat jarak jauh (e-learning)	1			

Unit Kegiatan	Indikator Unit Kegiatan	Penanggung Jawab Kegiatan	Satuan	Kegiatan			Keterangan		
				Indikator Kinerja		Rencana Tingkat Capaian (Target)			
1	2	3	4	5		6	7		
Perencanaan, Evaluasi dan Pengembangan E-Learning (UK1)									
Perencanaan dan Pengembangan E-Learning (EK1)									
Terlaksananya pembinaan dan pengembangan organisasi diklat	C	Hibah Luar Negeri - Pengembangan Kursil/Modul Baru, - Training Workshop Blended Learning, - Face to Face on Site Training (Blended Learning for Various Training), - KPH Operationalization and Change Management Trainings; - Central Level Administration-Knowledge Centre Developer - Competitions, - Identifikasi Kebutuhan Diklat (IKD), Perencanaan dan Program Diklat Jangka Panjang	Sub Bidang Perencanaan dan Pengembangan E-Learning	Rp	Masukan	:	- Dana	2.783.259.000	
				Orang		:	- SDM	10	
				Laporan	Keluaran	:	Terlaksananya kegiatan hibah luar negeri	7	
				Laporan	Hasil	:	Tersedianya laporan kegiatan hibah luar negeri	7	

Unit Kegiatan	Indikator Unit Kegiatan	Penanggung Jawab Kegiatan	Satuan	Kegiatan				Keterangan	
				Indikator Kinerja		Rencana Tingkat Capaian (Target)			
1	2	3	4	5		6	7		
Perencanaan, Evaluasi dan Pengembangan E-Learning (UK1)									
Evaluasi, Akreditasi, dan Kerjasama (EK2)									
Terlaksananya pembinaan dan pengembangan organisasi diklat	A	Laporan Evaluasi Pasca Diklat	Sub Bidang Evaluasi, Akreditasi, dan Kerjasama	Rp	Masukan	:	- Dana	151.735.000	
				Orang			- SDM	100	
				Laporan	Keluaran	:	Laporan evaluasi pasca diklat	1	
				Laporan	Hasil	:	Tersedianya Laporan Evaluasi Pasca Diklat	1	
				-	Manfaat	:	Mengetahui penyelenggaraan diklat berjalan secara efektif dan efisien sesuai perencanaan	-	
	B	Laporan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Diklat		Rp	Masukan	:	- Dana	127.930.000	
				Orang			- SDM	100	
				Laporan	Keluaran	:	Laporan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan diklat	20	
				Laporan	Hasil	:	Tersedianya Laporan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan diklat	20	
				-	Manfaat	:	Mengetahui penyelenggaraan diklat berjalan secara efektif dan efisien sesuai perencanaan	-	

Unit Kegiatan	Indikator Unit Kegiatan	Penanggung Jawab Kegiatan	Satuan	Kegiatan				Keterangan	
				Indikator Kinerja		Rencana Tingkat Capaian (Target)			
1	2	3	4	5		6		7	
Perencanaan, Evaluasi dan Pengembangan E-Learning (UK1)									
Evaluasi, Akreditasi, dan Kerjasama (EK2)									
Terlaksananya pembinaan dan pengembangan organisasi diklat	C	Jumlah Buku Terbitan/Majalah/Leaflet	Sub Bidang Evaluasi, Akreditasi, dan Kerjasama	Rp	Masukan	:	- Dana	86.845.000	
				Orang			- SDM	12	
				Edisi	Keluaran	:	Majalah Silvika	3	
				Edisi	Hasil	:	Tersedianya majalah Silvika Pusat Diklat SDM LHK	3	
				Orang			- SDM	12	
				Judul	Keluaran	:	Leaflet Pusat Diklat SDM LHK	3	
				Judul	Hasil	:	Tersedianya Leaflet Pusat Diklat SDM LHK	3	
				Orang			- SDM	12	
				Judul	Keluaran	:	Buku Terbitan Pusat Diklat SDM LHK	3	
				Judul	Hasil	:	Tersedianya Buku Terbitan Pusat Diklat SDM LHK	3	

Unit Kegiatan	Indikator Unit Kegiatan	Penanggung Jawab Kegiatan	Satuan	Kegiatan				Keterangan	
				Indikator Kinerja		Rencana Tingkat Capaian (Target)			
1	2	3	4	5		6		7	
Perencanaan, Evaluasi dan Pengembangan E-Learning (UK1)									
Evaluasi, Akreditasi, dan Kerjasama (EK2)									
Terlaksananya pembinaan dan pengembangan organisasi diklat	D	Pengelolaan Informasi Kediklatan	Sub Bidang Evaluasi, Akreditasi, dan Kerjasama	Rp	Masukan	:	- Dana	25.895.000	
				Orang			- SDM	3	
				Laporan	Keluaran	:	Website Kediklatan	1	
				Laporan	Hasil	:	Informasi kediklatan tersedia bagi pengguna diklat	1	
	E	Laporan Pengembangan Kerjasama Kediklatan		Rp	Masukan	:	- Dana	60.695.000	
				Orang			- SDM	50	
				Laporan	Keluaran	:	Laporan Kerjasama Kediklatan	1	
				Laporan	Hasil	:	Tersedianya Laporan Kerjasama Kediklatan	1	

Unit Kegiatan	Indikator Unit Kegiatan	Penanggung Jawab Kegiatan	Satuan	Kegiatan				Keterangan	
				Indikator Kinerja			Rencana Tingkat Capaian (Target)		
1	2	3	4	5			6	7	
Perencanaan, Evaluasi dan Pengembangan E-Learning (UK1)									
Evaluasi, Akreditasi, dan Kerjasama (EK2)									
Terlaksananya pembinaan dan pengembangan organisasi diklat	F	Laporan Akreditasi Kelembagaan Diklat Internal dan Eksternal	Sub Bidang Evaluasi, Akreditasi, dan Kerjasama	Rp	Masukan	:	- Dana	22.360.000	
				Orang			- SDM	100	
				Laporan	Keluaran	:	Laporan Akreditasi	1	
				Laporan	Hasil	:	Tersedianya Laporan Akreditasi	1	
	G	Laporan Sistem Pengawas Intern Pemerintah (SPIP)		Rp	Masukan	:	- Dana	11.875.000	
				Orang			- SDM	35	
				Laporan	Keluaran	:	Laporan Sistem Pengawasan Intern Pemerintah (SPIP)	1	
				Laporan	Hasil	:	Tersedianya Laporan Sistem Pengawasan Intern Pemerintah (SPIP)	1	
	H	Laporan Evaluasi Pelaporan dan Publikasi	Rp	Masukan	:	- Dana	119.100.000		
			Orang			- SDM	35		
			Laporan	Keluaran	:	Laporan kegiatan evaluasi pelaporan	1		
			Laporan	Hasil	:	Tersedianya Laporan kegiatan evaluasi pelaporan	1		

Unit Kegiatan	Indikator Unit Kegiatan	Penanggung Jawab Kegiatan	Satuan	Kegiatan		Keterangan		
				Indikator Kinerja	Rencana Tingkat Capaian (Target)			
1	2	3	4	5	6	7		
Penyelenggaraan Diklat Teknis (UK2)								
Diklat Teknis (EK1)								
Terselenggaranya diklat fungsional bagi pejabat/calon pejabat fungsional pada Kementerian LHK sebanyak 4.603 orang	A	Sub Bidang Diklat Teknis	Rp	Masukan	:	- Dana	326.200.000	
			Orang			- SDM	7	
			Orang	Keluaran	:	Non aparatur LHK (Petani Hutan dan Pendamping) yang mengikuti Pelatihan Pendampingan Perhutanan Sosial Paska Izin Jarak Jauh Secara Elektronik (E-Learning)	482	
			Orang	Hasil	:	Tersedianya Non aparatur LHK (Petani Hutan dan Pendamping) yang mampu berperan secara profesional dalam pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan	482	
	B		Rp	Masukan	:	- Dana	130.570.000	
			Orang			- SDM	7	
			Orang	Keluaran	:	Non aparatur LHK yang mengikuti Pelatihan Pengendalian Karhutla Bagi MPA Berkesadaran Hukum Secara Elektronik (E-Learning)	86	
			Orang	Hasil	:	Tersedianya Non aparatur LHK yang mampu berperan secara profesional dalam pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan	86	

Unit Kegiatan	Indikator Unit Kegiatan	Penanggung Jawab Kegiatan	Satuan	Kegiatan		Keterangan		
				Indikator Kinerja	Rencana Tingkat Capaian (Target)			
1	2	3	4	5	6	7		
Penyelenggaraan Diklat Teknis (UK2)								
Diklat Teknis (EK1)								
Terselenggaranya diklat fungsional bagi pejabat/calon pejabat fungsional pada Kementerian LHK sebanyak 4.603 orang	C	Sub Bidang Diklat Teknis	Rp	Masukan	:	- Dana	137.370.000	
			Orang			- SDM	7	
			Orang	Keluaran	:	Pegawai Kementerian LHK yang mengikuti Pelatihan Analisis Neraca Air Sebagai Dasar Mitigasi Bencana Alam Dan Rehabilitasi Lahan Secara Elektronik (E-Learning)	198	
			Orang	Hasil	:	Tersedianya Pegawai Kementerian LHK yang mampu berperan secara profesional dalam pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan	198	
	D		Rp	Masukan	:	- Dana	277.800.000	
			Orang			- SDM	7	
			Laporan	Keluaran	:	Non aparatur LHK yang mengikuti Pelatihan Pemetaan Partisipatif Berbasis Digital Bagi Program Perhutanan Sosial Secara Elektronik/E-Learning	180	
			Laporan	Hasil	:	Tersedianya Non aparatur LHK yang mampu berperan secara profesional dalam pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan	180	

Unit Kegiatan	Indikator Unit Kegiatan	Penanggung Jawab Kegiatan	Satuan	Kegiatan		Keterangan			
				Indikator Kinerja	Rencana Tingkat Capaian (Target)				
1	2	3	4	5	6	7			
Penyelenggaraan Diklat Teknis (UK2)									
Diklat Teknis (EK1)									
Terselenggaranya diklat fungsional bagi pejabat/calon pejabat fungsional pada Kementerian LHK sebanyak 4.603 orang	E	Penyelenggaraan Pelatihan Pemetaan Partisipatif Berbasis Digital Bagi Program TORA Secara Elektronik (E Learning)	Sub Bidang Diklat Teknis	Rp	Masukan	:	- Dana	102.000.000	
				Orang			- SDM	7	
				Orang	Keluaran	:	Non aparatur LHK yang mengikuti Pelatihan Pemetaan Partisipatif Berbasis Digital Bagi Program TORA Secara Elektronik (E Learning)	120	
				Orang	Hasil	:	Tersedianya Non aparatur LHK yang mampu berperan secara profesional dalam pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan	120	
	F	Penyelenggaraan Pelatihan Agroforestry (Pelatihan Peningkatan Kapasitas KTH Dan KUPS Dalam Pengelolaan Usaha) Secara Blended Learning		Rp	Masukan	:	- Dana	3.994.251.000	
				Orang			- SDM	7	
				Orang	Keluaran	:	Non aparatur LHK yang mengikuti Pelatihan Agroforestry (Pelatihan Peningkatan Kapasitas KTH dan KUPS Dalam Pengelolaan Usaha) Secara Blended Learning	1.983	
				Orang	Hasil	:	Tersedianya Non aparatur LHK yang mampu berperan secara profesional dalam pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan	1.983	

Unit Kegiatan	Indikator Unit Kegiatan	Penanggung Jawab Kegiatan	Satuan	Kegiatan		Keterangan			
				Indikator Kinerja	Rencana Tingkat Capaian (Target)				
1	2	3	4	5	6	7			
Penyelenggaraan Diklat Teknis (UK2)									
Diklat Teknis (EK1)									
Terselenggaranya diklat fungsional bagi pejabat/calon pejabat fungsional pada Kementerian LHK sebanyak 4.603 orang	G	Penyelenggaraan Pelatihan Bagi Pendamping	Sub Bidang Diklat Teknis	Rp	Masukan	:	- Dana	150.000.000	
				Orang			- SDM	7	
				Orang	Keluaran	:	Aparatur LHK yang mengikuti Pelatihan Bagi Pendamping	93	
				Orang	Hasil	:	Tersedianya Aparatur LHK yang mampu berperan secara profesional dalam pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan	93	
	H	Penyelenggaraan Pelatihan Agroforestry (Pelatihan Peningkatan Kapasitas KTH dan KUPS Dalam Pengelolaan Usaha) Secara Klasikal On Site		Rp	Masukan	:	- Dana	2.115.749.000	
				Orang			- SDM	7	
				Laporan	Keluaran	:	Non aparatur LHK yang mengikuti Pelatihan Agroforestry (Pelatihan Peningkatan Kapasitas KTH dan KUPS Dalam Pengelolaan Usaha) Secara Klasikal On Site	682	
				Laporan	Hasil	:	Tersedianya Non aparatur LHK yang mampu berperan secara profesional dalam pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan	682	

Unit Kegiatan	Indikator Unit Kegiatan	Penanggung Jawab Kegiatan	Satuan	Kegiatan		Keterangan			
				Indikator Kinerja	Rencana Tingkat Capaian (Target)				
1	2	3	4	5	6	7			
Penyelenggaraan Diklat Teknis (UK2)									
Diklat Teknis (EK1)									
Terselenggaranya diklat fungsional bagi pejabat/calon pejabat fungsional pada Kementerian LHK sebanyak 4.603 orang	I	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi Peserta Didik SMK Kehutanan	Sub Bidang Diklat Teknis	Rp	Masukan	:	- Dana	45.650.000	
				Orang			- SDM	7	
				Laporan	Keluaran	:	Laporan kegiatan fasilitasi sertifikasi kompetensi peserta didik SMK Kehutanan	1	
				Laporan	Hasil	:	Tersedianya Laporan kegiatan fasilitasi sertifikasi kompetensi peserta didik SMK Kehutanan	1	
	J	Penyelenggaraan Pendukung Kegiatan Lomba Karya Tulis Peserta Didik SMK Kehutanan Negeri Tahun 2020		Rp	Masukan	:	- Dana	70.350.000	
				Orang			- SDM	7	
				Laporan	Keluaran	:	Laporan pendukung kegiatan lomba karya tulis peserta didik SMK Kehutanan Negeri Tahun 2020	1	
				Laporan	Hasil	:	Tersedianya Laporan pendukung kegiatan lomba karya tulis peserta didik SMK Kehutanan Negeri Tahun 2020	1	

Unit Kegiatan	Indikator Unit Kegiatan	Penanggung Jawab Kegiatan	Satuan	Kegiatan				Keterangan	
				Indikator Kinerja		Rencana Tingkat Capaian (Target)			
1	2	3	4	5		6		7	
Penyelenggaraan Diklat Teknis (UK2)									
Diklat Fungsional dan Karyasiswa (EK2)									
Terselenggaranya diklat fungsional bagi pejabat/calon pejabat fungsional pada Kementerian LHK sebanyak 4.603 orang	K	Pembinaan Teknis SMK Kehutanan Dan Penyelenggaraan Diklat Teknis Lingkungan Hidup Dan Kehutanan	Sub Bidang Diklat Teknis	Rp	Masukan	:	- Dana	92.600.000	
				Orang			- SDM	7	
				Laporan	Keluaran	:	Laporan Pembinaan Teknis SMK Kehutanan Dan Penyelenggaraan Diklat Teknis Lingkungan Hidup Dan Kehutanan	1	
				Laporan	Hasil	:	Tersedianya Laporan Pembinaan Teknis SMK Kehutanan Dan Penyelenggaraan Diklat Teknis Lingkungan Hidup Dan Kehutanan	1	

Unit Kegiatan	Indikator Unit Kegiatan	Penanggung Jawab Kegiatan	Satuan	Kegiatan				Keterangan	
				Indikator Kinerja		Rencana Tingkat Capaian (Target)			
1	2	3	4	5		6		7	
Penyelenggaraan Diklat Teknis (UK2)									
Diklat Fungsional dan Karyasiswa (EK2)									
Terselenggaranya diklat fungsional bagi pejabat/calon pejabat fungsional pada Kementerian LHK sebanyak 4.603 orang	A	Penyelenggaraan Pelatihan Pembentukan Polhut Tingkat Ahli	Sub Bidang Diklat Fungsional dan Karyasiswa	Rp	Masukan	:	- Dana	12.235.000	
				Orang			- SDM	7	
				Orang	Keluaran	:	Pegawai Kementerian LHK yang mengikuti Pelatihan Penjenjangan Fungsional Polhut Ahli Jenjang Madya	69	
				Orang	Hasil	:	Tersedianya pejabat Fungsional Polhut yang mampu berperan secara profesional dalam pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan	0	

Unit Kegiatan	Indikator Unit Kegiatan	Penanggung Jawab Kegiatan	Satuan	Kegiatan				Keterangan	
				Indikator Kinerja		Rencana Tingkat Capaian (Target)			
1	2	3	4	5		6		7	
Penyelenggaraan Diklat Teknis (UK2)									
Diklat Fungsional dan Karyasiswa (EK2)									
Terselenggaranya diklat fungsional bagi pejabat/calon pejabat fungsional pada Kementerian LHK sebanyak 4.603 orang	B	Penyelenggaraan Pelatihan Penjenjangan PEH Jenjang Madya Jarak Jauh Dengan Elektronik (E-Learning)	Sub Bidang Diklat Fungsional dan Karyasiswa	Rp	Masukan	:	- Dana	150.680.000	
				Orang			- SDM	7	
				Orang	Keluaran	:	Pegawai Kementerian LHK yang mengikuti Pelatihan Penjenjangan PEH Jenjang Madya Jarak Jauh Dengan Elektronik (E-Learning)	64	
				Orang	Hasil	:	Tersedianya pejabat Fungsional PEH yang mampu berperan secara profesional dalam pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan	64	

Unit Kegiatan	Indikator Unit Kegiatan	Penanggung Jawab Kegiatan	Satuan	Kegiatan				Keterangan	
				Indikator Kinerja		Rencana Tingkat Capaian (Target)			
1	2	3	4	5		6		7	
Penyelenggaraan Diklat Teknis (UK2)									
Diklat Fungsional dan Karyasiswa (EK2)									
Terselenggaranya diklat fungsional bagi pejabat/calon pejabat fungsional pada Kementerian LHK sebanyak 4.603 orang	C	Penyelenggaraan Pelatihan Pembentukan PEH Tingkat Ahli Angkatan I dan II	Sub Bidang Diklat Fungsional dan Karyasiswa	Rp	Masukan	:	- Dana	557.915.000	
				Orang			- SDM	7	
				Orang	Keluaran	:	Pegawai Kementerian LHK yang mengikuti Pelatihan Pembentukan PEH Tingkat Ahli	76	
				Orang	Hasil	:	Tersedianya pejabat Fungsional PEH yang mampu berperan secara profesional dalam pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan	76	

Unit Kegiatan	Indikator Unit Kegiatan	Penanggung Jawab Kegiatan	Satuan	Kegiatan				Keterangan	
				Indikator Kinerja		Rencana Tingkat Capaian (Target)			
1	2	3	4	5		6		7	
Penyelenggaraan Diklat Teknis (UK2)									
Diklat Fungsional dan Karyasiswa (EK2)									
Terselenggaranya diklat fungsional bagi pejabat/calon pejabat fungsional pada Kementerian LHK sebanyak 4.603 orang	D	Penyelenggaraan Pelatihan Pembentukan PEH Tingkat Ahli Jarak Jauh Dengan Elektronik (E-Learning) Angkatan III, IV dan V	Sub Bidang Diklat Fungsional dan Karyasiswa	Rp	Masukan	:	- Dana	314.920.000	
				Orang			- SDM	7	
				Orang	Keluaran	:	Pegawai Kementerian LHK yang mengikuti Pelatihan Pembentukan PEH Tingkat Ahli Jarak Jauh Dengan Elektronik (E-Learning)	112	
				Orang	Hasil	:	Tersedianya pejabat Fungsional PEH yang mampu berperan secara profesional dalam pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan	112	

Unit Kegiatan	Indikator Unit Kegiatan	Penanggung Jawab Kegiatan	Satuan	Kegiatan			Keterangan		
				Indikator Kinerja		Rencana Tingkat Capaian (Target)			
1	2	3	4	5		6	7		
Penyelenggaraan Diklat Teknis (UK2)									
Diklat Fungsional dan Karyasiswa (EK2)									
Terselenggaranya diklat fungsional bagi pejabat/calon pejabat fungsional pada Kementerian LHK sebanyak 4.603 orang	E	Penyelenggaraan Pelatihan Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan	Sub Bidang Diklat Fungsional dan Karyasiswa	Rp	Masukan	:	- Dana	188.739.000	
				Orang			- SDM	7	
				Orang	Keluaran	:	Pegawai Kementerian LHK yang mengikuti Pelatihan Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan	60	
				Orang	Hasil	:	Tersedianya pejabat Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan yang mampu berperan secara profesional dalam pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan	60	

Unit Kegiatan	Indikator Unit Kegiatan	Penanggung Jawab Kegiatan	Satuan	Kegiatan			Keterangan		
				Indikator Kinerja		Rencana Tingkat Capaian (Target)			
1	2	3	4	5		6	7		
Penyelenggaraan Diklat Teknis (UK2)									
Diklat Fungsional dan Karyasiswa (EK2)									
Penyelenggaraanya diklat fungsional bagi pejabat/calon pejabat fungsional pada Kementerian LHK sebanyak 4.603 orang	F	Penyelenggaraan Pelatihan Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan Jarak Jauh Dengan Elektronik (E-Learning)	Sub Bidang Diklat Fungsional dan Karyasiswa	Rp	Masukan	:	- Dana	74.000.000	
				Orang			- SDM	7	
				Orang	Keluaran	:	Pegawai Kementerian LHK yang mengikuti Pelatihan Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan Jarak Jauh Dengan Elektronik (E-Learning)	40	
				Orang	Hasil	:	Tersedianya pejabat Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan yang mampu berperan secara profesional dalam pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan	40	
	G	Rakor Diklat Fungsional	Sub Bidang Diklat Fungsional dan Karyasiswa	Rp	Masukan	:	- Dana	8.020.000	
				Orang			- SDM	7	
				Laporan	Keluaran	:	Laporan Rakor Diklat Fungsional	1	
				Laporan	Hasil	:	Laporan Kebutuhan Diklat Fungsional	1	

Unit Kegiatan	Indikator Unit Kegiatan	Penanggung Jawab Kegiatan	Satuan	Kegiatan				Keterangan	
				Indikator Kinerja		Rencana Tingkat Capaian (Target)			
1	2	3	4	5		6		7	
Penyelenggaraan Diklat Teknis (UK2)									
Diklat Fungsional dan Karyasiswa (EK2)									
Terselenggaranya pengelolaan pendidikan program pasca sarjana (S2 dan S3) bagi aparatur lingkungan hidup dan kehutanan sebanyak 340 orang	H	Penyelenggaraan Karyasiswa S2 SDM LHK	Sub Bidang Diklat Fungsional dan Karyasiswa	Rp	Masukan	:	- Dana	2.094.330.000	
				Orang			- SDM	7	
				Orang	Keluaran	:	Pegawai Kementerian LHK yang mengikuti pendidikan program S-2	20	
				Orang	Hasil	:	Bertambahnya pengetahuan & kemampuan pegawai kementerian LHK dengan kualifikasi pendidikan lulusan S-2	20	

Unit Kegiatan	Indikator Unit Kegiatan	Penanggung Jawab Kegiatan	Satuan	Kegiatan				Keterangan	
				Indikator Kinerja		Rencana Tingkat Capaian (Target)			
1	2	3	4	5		6		7	
Penyelenggaraan Diklat Teknis (UK2)									
Diklat Fungsional dan Karyasiswa (EK2)									
Terselenggaranya pengelolaan pendidikan program pasca sarjana (S2 dan S3) bagi aparatur lingkungan hidup dan kehutanan sebanyak 340 orang	I	Penyelenggaraan Karyasiswa S3 SDM LHK	Sub Bidang Diklat Fungsional dan Karyasiswa	Rp	Masukan	:	- Dana	488.601.000	
				Orang			- SDM	7	
				Orang	Keluaran	:	Pegawai Kementerian LHK yang mengikuti pendidikan program S-3	3	
				Orang	Hasil	:	Bertambahnya pengetahuan & kemampuan pegawai kementerian LHK dengan kualifikasi pendidikan lulusan S-3	3	

Unit Kegiatan	Indikator Unit Kegiatan	Penanggung Jawab Kegiatan	Satuan	Kegiatan				Keterangan	
				Indikator Kinerja		Rencana Tingkat Capaian (Target)			
1	2	3	4	5		6		7	
Penyelenggaraan Diklat Teknis (UK2)									
Diklat Fungsional dan Karyasiswa (EK2)									
Terselenggaranya pengelolaan pendidikan program pasca sarjana (S2 dan S3) bagi aparatur lingkungan hidup dan kehutanan sebanyak 340 orang	J	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan	Sub Bidang Diklat Fungsional dan Karyasiswa	Rp	Masukan	:	- Dana	289.509.000	
				Orang			- SDM	7	
				Laporan	Keluaran	:	Dokumen persiapan dan pelaksanaan pendidikan pasca sarjana dan data lulusan karyasiswa	1	
				Laporan	Hasil	:	Administrasi pengelolaan karyasiswa berjalan dengan tertib	1	

Unit Kegiatan	Indikator Unit Kegiatan	Penanggung Jawab Kegiatan	Satuan	Kegiatan				Keterangan	
				Indikator Kinerja		Rencana Tingkat Capaian (Target)			
1	2	3	4	5		6		7	
Penyelenggaraan Diklat Kepemimpinan dan Administrasi (UK3)									
Diklat Kepemimpinan (EK1)									
Terselenggaranya Diklat Kepemimpinan bagi pejabat/calon pejabat struktural Kementerian LHK sebanyak 83 orang DIKPIM II	A	Penyelenggaraan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat II	Sub Bidang Diklat Kepemimpinan	Rp	Masukan	:	- Dana	201.066.000	
				Orang			- SDM	6	
				Orang	Keluaran	:	Pegawai Kementerian LHK yang mengikuti Diklat Kepemimpinan Tingkat II	6	
				Orang	Hasil	:	Tersedianya pegawai Kementerian LHK yang telah memiliki kompetensi/kemampuan kepemimpinan tingkat II	6	

Unit Kegiatan	Indikator Unit Kegiatan	Penanggung Jawab Kegiatan	Satuan	Kegiatan				Keterangan	
				Indikator Kinerja		Rencana Tingkat Capaian (Target)			
1	2	3	4	5		6		7	
Penyelenggaraan Diklat Kepemimpinan dan Administrasi (UK3)									
Diklat Kepemimpinan (EK1)									
Terlaksananya pembinaan dan pengembangan organisasi diklat	B	Workshop Penyelenggaraan Pelatihan Kepemimpinan Administrator dan Pengawas	Sub Bidang Diklat Kepemimpinan	Rp	Masukan	:	- Dana	68.850.000	
				Orang			- SDM	7	
				Laporan	Keluaran	:	Laporan Kegiatan Workshop Penyelenggaraan Pelatihan Kepemimpinan Administrator dan Pengawas	1	
				Laporan	Hasil	:	Tersedianya laporan Workshop Penyelenggaraan Pelatihan Kepemimpinan Administrator dan Pengawas	1	
	C	Seminar Inovasi Diklat Kepemimpinan		Rp	Masukan	:	- Dana	58.170.000	
				Orang			- SDM	7	
				Laporan	Keluaran	:	Laporan Seminar Inovasi Diklat Kepemimpinan	1	
				Laporan	Hasil	:	Tersedianya Laporan Seminar Inovasi Diklat Kepemimpinan	1	

Unit Kegiatan	Indikator Unit Kegiatan	Penanggung Jawab Kegiatan	Satuan	Kegiatan				Keterangan	
				Indikator Kinerja		Rencana Tingkat Capaian (Target)			
1	2	3	4	5		6		7	
Penyelenggaraan Diklat Kepemimpinan dan Administrasi (UK3)									
Diklat Administrasi (EK2)									
Terselenggaranya diklat administrasi lingkungan hidup dan kehutanan bagi aparatur lingkungan hidup dan kehutanan sebanyak 3.410 orang	A	Training Officer Course (TOC) Sub Admin Pelatihan Jarak Jauh Secara Elektronik (Pelaksana Pelatihan Dengan Metode E-Learning)	Sub Bidang Diklat Administrasi	Rp	Masukan	:	- Dana	36.335.000	
				Orang			- SDM	7	
				Orang	Keluaran	:	Pegawai Kementerian LHK yang mengikuti Training Officer Course (TOC) Sub Admin Pelatihan Jarak Jauh Secara Elektronik (Pelaksana Pelatihan Dengan Metode E-Learning)	128	
				Orang	Hasil	:	Tersedianya Pegawai Kementerian LHK yang mampu berperan secara profesional dalam menyelenggarakan pelatihan jarak jauh / E-Learning	128	
	B	Pelatihan Kewidyaiswaraan Berjenjang Tingkat Tinggi		Rp	Masukan	:	- Dana	187.980.000	
				Orang			- SDM	7	
				Orang	Keluaran	:	Aparatur LHK yang mengikuti Pelatihan Kewidyaiswaraan Berjenjang Tingkat Tinggi	30	
				Orang	Hasil	:	Tersedianya Aparatur LHK yang telah mengikuti Pelatihan Kewidyaiswaraan Berjenjang Tingkat Tinggi	30	

Unit Kegiatan	Indikator Unit Kegiatan	Penanggung Jawab Kegiatan	Satuan	Kegiatan				Keterangan	
				Indikator Kinerja		Rencana Tingkat Capaian (Target)			
1	2	3	4	5		6		7	
Layanan Program dan Umum (UK4)									
Kepegawaian (EK2)									
Terselenggaranya diklat administrasi lingkungan hidup dan kehutanan bagi aparatur lingkungan hidup dan kehutanan sebanyak 3.410 orang	C	Training Of Trainer Substansi	Sub Bidang Diklat Administrasi	Rp	Masukan	:	- Dana	215.850.000	
				Orang			- SDM	7	
				Orang	Keluaran	:	Aparatur LHK yang mengikuti Pelatihan Training Of Trainer (ToT) Substansi	371	
				Orang	Hasil	:	Tersedianya Aparatur LHK yang telah mengikuti Pelatihan Training Of Trainer (ToT) Substansi	371	
	D	Pelatihan Strategi Komunikasi Untuk Promosi Dan Pemasaran Jasa Lingkungan Wisata Alam Di Kawasan Konservasi		Rp	Masukan	:	- Dana	30.700.000	
				Orang			- SDM	7	
				Orang	Keluaran	:	Pegawai Kementerian LHK yang mengikuti Pelatihan Strategi Komunikasi Untuk Promosi Dan Pemasaran Jasa Lingkungan Wisata Alam Di Kawasan Konservasi	40	
				Orang	Hasil	:	Tersedianya Pegawai Kementerian LHK yang mampu berperan secara profesional dalam pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan	40	

Unit Kegiatan	Indikator Unit Kegiatan	Penanggung Jawab Kegiatan	Satuan	Kegiatan				Keterangan	
				Indikator Kinerja		Rencana Tingkat Capaian (Target)			
1	2	3	4	5		6		7	
Layanan Program dan Umum (UK4)									
Kepegawaian (EK2)									
Terselenggaranya diklat administrasi lingkungan hidup dan kehutanan bagi aparatur lingkungan hidup dan kehutanan sebanyak 3.410 orang	E	Koordinasi Penyelenggaraan Diklat	Sub Bidang Diklat Administrasi	Rp	Masukan	:	- Dana	53.949.000	
				Orang			- SDM	7	
				Laporan	Keluaran	:	Laporan koordinasi penyelenggaraan diklat	1	
				Laporan	Hasil	:	Tersedianya informasi evaluasi penyelenggaraan diklat	1	
	F	Penyusunan pedoman evaluasi penilaian latsar CPNS		Rp	Masukan	:	- Dana	38.150.000	
				Orang			- SDM	7	
				Laporan	Keluaran	:	Laporan kegiatan penyusunan pedoman evaluasi penilaian latsar CPNS	1	
				Laporan	Hasil	:	Tersedianya pedoman evaluasi penilaian latsar CPNS	1	

Unit Kegiatan	Indikator Unit Kegiatan	Penanggung Jawab Kegiatan	Satuan	Kegiatan			Keterangan		
				Indikator Kinerja		Rencana Tingkat Capaian (Target)			
1	2	3	4	5		6	7		
Layanan Program dan Umum (UK4)									
Program (EK1)									
Terlaksananya pembinaan dan pengembangan organisasi diklat	A	Renja, Renstra, dan Monitoring IKK	Sub Bagian Program	Rp	Masukan	:	- Dana	75.615.000	
				Orang			- SDM	5	
				Buku	Keluaran	:	Dokumen RKT dan Renstra	120	
				Buku	Hasil	:	Rencana dan Program Diklat Optimal dan Terarah	120	
	B	Perencanaan Penyusunan dan Revisi Anggaran		Rp	Masukan	:	- Dana	131.661.000	
				Orang			- SDM	5	
				Dokumen	Keluaran	:	RKAKL/DIPA	5	
				Dokumen	Hasil	:	Rencana dan Program Diklat Optimal dan Terarah	5	
	C	Pemeliharaan dan Penerapan ISO 9001:2015		Rp	Masukan	:	- Dana	53.543.000	
				Orang			- SDM	30	
				Dokumen	Keluaran	:	Dokumen ISO	1	
				Dokumen	Hasil	:	Komitmen manajemen, perbaikan terus menerus dan kepuasan pelanggan	1	
				-	Manfaat	:	Diklat berkualitas dan sesuai dengan kebutuhan	-	

Unit Kegiatan	Indikator Unit Kegiatan	Penanggung Jawab Kegiatan	Satuan	Kegiatan				Keterangan	
				Indikator Kinerja		Rencana Tingkat Capaian (Target)			
1	2	3	4	5		6		7	
Layanan Program dan Umum (UK4)									
Kepegawaian (EK2)									
Terlaksananya pembinaan dan pengembangan organisasi diklat	A	Kepegawaian	Sub Bagian Kepegawaian	Rp	Masukan	:	- Dana	57.480.000	
				Orang			- SDM	7	
				Laporan	Keluaran	:	Laporan Mutasi/administrasi kepegawaian (Formasi, Kenaikan pangkat dan jabatan)	1	
				Laporan	Hasil	:	Terpenuhinya hak pegawai	1	
				-	Manfaat	:	Pegawai dapat melaksanakan tugas dengan optimal	-	
	B	Kewidyaiswaraan		Rp	Masukan	:	- Dana	166.676.000	
				Orang			- SDM	7	
				Laporan	Keluaran	:	Laporan kewidyaiswaraan	1	
				Laporan	Hasil	:	Terpenuhinya hak pegawai	1	
				-	Manfaat	:	Pegawai dapat melaksanakan tugas dengan optimal	-	

Unit Kegiatan	Indikator Unit Kegiatan	Penanggung Jawab Kegiatan	Satuan	Kegiatan				Keterangan	
				Indikator Kinerja		Rencana Tingkat Capaian (Target)			
1	2	3	4	5		6		7	
Layanan Program dan Umum (UK4)									
Kepegawaian (EK2)									
Terlaksananya pembinaan dan pengembangan organisasi diklat	C	Peningkatan Kompetensi Pegawai	Sub Bagian Kepegawaian	Rp	Masukan	:	- Dana	35.000.000	
				Orang			- SDM	7	
				Laporan	Keluaran	:	Laporan peningkatan kemampuan pegawai	1	
				Laporan	Hasil	:	Terpenuhinya hak pegawai	1	
				-	Manfaat	:	Pegawai dapat melaksanakan tugas dengan optimal	-	
	D	Koordinasi/Konsultasi/ Pembinaan Teknis Penyelenggaraan Diklat/ Kerjasama Diklat		Rp	Masukan	:	- Dana	424.779.000	
				Orang			- SDM	9	
				Laporan	Keluaran	:	Terlaksananya kegiatan Koordinasi/Konsultasi/ Pembinaan Teknis Penyelenggaraan Diklat/ Kerjasama Diklat	1	
				Laporan	Hasil	:	Terlaksananya kegiatan Koordinasi/Konsultasi/ Pembinaan Teknis Penyelenggaraan Diklat/ Kerjasama Diklat	1	
				-	Manfaat	:	Pegawai dapat melaksanakan tugas dengan optimal	-	

Unit Kegiatan	Indikator Unit Kegiatan		Penanggung Jawab Kegiatan	Satuan	Kegiatan			Keterangan	
					Indikator Kinerja	Rencana Tingkat Capaian (Target)			
1	2		3	4	5	6	7		
Layanan Program dan Umum (UK4)									
Kepegawaian (EK2)									
Terlaksananya pembinaan dan pengembangan organisasi diklat	E	Peningkatan Kapasitas Tenaga Kediklatan	Sub Bagian Kepegawaian	Rp	Masukan	:	- Dana	28.000.000	
				Orang			- SDM	7	
				Laporan	Keluaran	:	Laporan peningkatan kapasitas tenaga kediklatan	1	
				Laporan	Hasil	:	Terpenuhinya hak pegawai	1	
				-	Manfaat	:	Pegawai dapat melaksanakan tugas dengan optimal	-	

Unit Kegiatan	Indikator Unit Kegiatan	Penanggung Jawab Kegiatan	Satuan	Kegiatan				Keterangan	
				Indikator Kinerja			Rencana Tingkat Capaian (Target)		
1	2	3	4	5			6	7	
Layanan Program dan Umum (UK4)									
Umum (EK3)									
Terlaksananya pembinaan dan pengembangan organisasi diklat	A	Ketatausahaan/BMN/Kuangan	Sub Bagian Umum	Rp	Masukan	:	- Dana	108.100.000	
				Orang			- SDM	9	
				Bulan	Keluaran	:	Terlaksananya kegiatan Ketatausahaan/BMN/ Keuangan	12	
				Bulan	Hasil	:	Terlaksananya kegiatan Ketatausahaan/BMN/ Keuangan	12	
	-	Manfaat		:	Pegawai dapat melaksanakan tugas dengan optimal	-			
	B	Kegiatan pendukung kediklatan dalam masa darurat Covid-19		Rp	Masukan	:	- Dana	305.225.000	
				Orang			- SDM	9	
				Laporan	Keluaran	:	Terlaksananya kegiatan pendukung kediklatan dalam masa darurat Covid-19	1	
				Laporan	Hasil	:	Pelaksanaan kegiatan dapat berjalan sesuai dengan ketentuan	1	

Unit Kegiatan	Indikator Unit Kegiatan		Penanggung Jawab Kegiatan	Satuan	Kegiatan			Keterangan	
					Indikator Kinerja		Rencana Tingkat Capaian (Target)		
1	2		3	4	5		6	7	
Layanan Program dan Umum (UK4)									
Umum (EK3)									
Terlaksananya pembinaan dan pengembangan organisasi diklat	C	Rumah Tangga, Perlengkapan, Dan Ketatausahaan Penunjang Kediklatan	Sub Bagian Umum	Rp	Masukan	:	- Dana	962.650.000	
				Orang			- SDM	9	
				Bulan	Keluaran	:	Terlaksananya kegiatan Rumah Tangga, Perlengkapan, Dan Ketatausahaan Penunjang Kediklatan	12	
				Bulan	Hasil	:	Terlaksananya kegiatan Rumah Tangga, Perlengkapan, Dan Ketatausahaan Penunjang Kediklatan	12	
				-	Manfaat	:	Pegawai dapat melaksanakan tugas dengan optimal	-	

Unit Kegiatan	Indikator Unit Kegiatan	Penanggung Jawab Kegiatan	Satuan	Kegiatan				Keterangan	
				Indikator Kinerja		Rencana Tingkat Capaian (Target)			
1	2	3	4	5		6		7	
Layanan Program dan Umum (UK4)									
Umum (EK3)									
Terlaksananya pembinaan dan pengembangan organisasi diklat	D	Gaji dan Tunjangan	Sub Bagian Umum	Rp	Masukan	:	- Dana	14.612.079.000	
				Orang			- SDM	9	
				Bulan	Keluaran	:	Terpenuhinya hak pegawai	12	
				Bulan	Hasil	:	Pegawai dapat melaksanakan tugas dengan optimal	12	
	E	Operasional Perkantoran		Rp	Masukan	:	- Dana	3.338.552.000	
				Orang			- SDM	30	
				Bulan	Keluaran	:	Terlaksananya pengelolaan operasional perkantoran dengan tertib	12	
				Bulan	Hasil	:	Pengelolaan Operasional perkantoran berjalan dengan optimal	12	

Unit Kegiatan	Indikator Unit Kegiatan	Penanggung Jawab Kegiatan	Satuan	Kegiatan			Keterangan		
				Indikator Kinerja		Rencana Tingkat Capaian (Target)			
1	2	3	4	5		6	7		
Layanan Program dan Umum (UK4)									
Umum (EK3)									
Terlaksananya pembinaan dan pengembangan organisasi diklat	F	Honor Pengelolaan Keuangan	Sub Bagian Umum	Rp	Masukan	:	- Dana	278.980.000	
				Orang			- SDM	50	
				Bulan	Keluaran	:	Terlaksananya pembayaran honor pengelolaan keuangan	12	
				Bulan	Hasil	:	Pengelolaan Keuangan berjalan dengan optimal	12	
	G	Perawatan Sarana Perkantoran		Rp	Masukan	:	- Dana	199.618.000	
				Orang			- SDM	50	
				Bulan	Keluaran	:	Terpeliharanya sarana dan prasarana diklat	12	
				Bulan	Hasil	:	Tersedia sarana dan prasarana diklat yang layak digunakan	12	

Unit Kegiatan	Indikator Unit Kegiatan	Penanggung Jawab Kegiatan	Satuan	Kegiatan			Keterangan		
				Indikator Kinerja		Rencana Tingkat Capaian (Target)			
1	2	3	4	5		6	7		
Layanan Program dan Umum (UK4)									
Umum (EK3)									
Tersedianya sarana dan prasarana penyelenggaraan diklat dan pendidikan sesuai dengan kebutuhan	H	Perawatan Kendaraan	Sub Bagian Umum	Rp	Masukan	:	- Dana	530.330.000	
				Orang			- SDM	50	
				Unit	Keluaran	:	Terpeliharanya sarana dan prasarana diklat	23	
				Unit	Hasil	:	Tersedia sarana dan prasarana diklat yang layak digunakan	23	
	I	Perawatan Gedung		Rp	Masukan	:	- Dana	1.701.544.000	
				Orang			- SDM	50	
				Bulan	Keluaran	:	Terpeliharanya sarana dan prasarana diklat	12	
				Bulan	Hasil	:	Tersedia sarana dan prasarana diklat yang layak digunakan	12	

Unit Kegiatan	Indikator Unit Kegiatan	Penanggung Jawab Kegiatan	Satuan	Kegiatan				Keterangan	
				Indikator Kinerja			Rencana Tingkat Capaian (Target)		
1	2	3	4	5			6	7	
Layanan Program dan Umum (UK4)									
Umum (EK3)									
Tersedianya sarana dan prasarana penyelenggaraan diklat dan pendidikan sesuai dengan kebutuhan	J	Pengadaan Layanan Internal	Sub Bagian Umum	Rp	Masukan	:	- Dana	625.000.000	
				Orang		:	- SDM	10	
				Paket	Keluaran	:	Terlaksananya kegiatan Pembangunan/Renovasi gedung bangunan	1	
				Paket	Hasil	:	Tersedianya Bangunan untuk penunjang kegiatan diklat dan bangunan untuk transit Kapusdiklat di Gedung Manggala Wanabakti	1	
	K	Pengadaan Peralatan Asrama dan Dapur		Rp	Masukan	:	- Dana	44.875.000	
				Orang		:	- SDM	50	
				Paket	Keluaran	:	Terlaksananya pengadaan peralatan asrama dan dapur	32	
				Paket	Hasil	:	Tersedianya peralatan asrama dan dapur yang layak digunakan	32	
	L	Penambah Daya Tahan Tubuh		Rp	Masukan	:	- Dana	52.022.000	
				Orang		:	- SDM	6	
				Bulan	Keluaran	:	Terpenuhinya kebutuhan untuk menambah daya tahan tubuh bagi pegawai pada masa darurat covid-19	12	
				Bulan	Hasil	:	Pegawai dapat melaksanakan tugas dengan optimal	12	

Unit Kegiatan		Indikator Unit Kegiatan	Penanggung Jawab Kegiatan	Satuan	Kegiatan			Keterangan	
					Indikator Kinerja		Rencana Tingkat Capaian (Target)		
1		2	3	4	5			6	7
Penyelenggaraan Diklat Teknis (UK2)									
Diklat Teknis (EK1)									
SMKKN								385.350.000	
Terselenggaranya pembinaan pendidikan kehutanan tingkat menengah	A	Penyelenggaraan Pendidikan Menengah Kejuruan Kehutanan 1. Dokumen Perencanaan dan Pembinaan	Sub Bidang Diklat Teknis						
				Rp	Masukan	:	- Dana	385.350.000	
				Orang			- SDM	7	
				Laporan	Keluaran	:	Laporan Pembinaan SMK Kehutanan	5	
				Laporan	Hasil	:	Meningkatkan pembinaan penyelenggaraan pendidikan menengah kejuruan bertaraf internasional	5	
				-	Manfaat	:	Penyelenggaraan pendidikan menengah kejuruan lebih berkualitas	-	
JUMLAH								40.469.312.000	